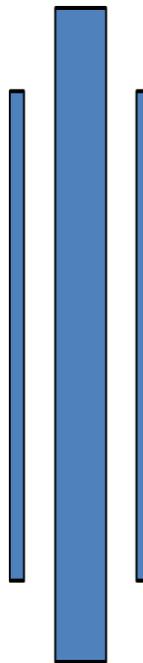




**LAPORAN KINERJA
INSTANSI PEMERINTAH
(LKJIP)
KECAMATAN KUTOWINANGUN
KABUPATEN KEBUMEN**



TAHUN ANGGARAN 2023

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Dalam rangka mewujudkan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan perlu disusun Laporan Kinerja Instansi. Disamping itu untuk mewujudkan administrasi negara yang mampu mendukung kelancaran dan ketepatan pelaksanaan tugas dan fungsi penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan yang mengarah pada prinsip pelayanan kepada masyarakat. Masyarakat menuntut agar pemerintah memberikan perhatian yang sungguh-sungguh dalam melaksanakan tugas-tugas kedinasan masing-masing, menekan dan menghindari kesalahan dan penyimpangan agar mampu memberikan pelayanan kepada masyarakat dengan maksimal.

Mendasari Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dalam rangka penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Kebumen yang mewajibkan setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggaraan negara dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan ditindaklanjuti dengan terbitnya PERMEN Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, maka dalam rangka penyusunan LKjIP tahun 2019 mengacu pada peraturan tersebut mengalami beberapa penyesuaian dilakukan secara bertahap, sehingga format penulisannya mengalami perubahan.

SKPD Kecamatan Kutowinangun mempunyai kewajiban memfasilitasi program program pemerintah Kabupaten Kebumen dan pelayanan masyarakat dalam rangka mewujudkan Visi dan Misi SKPD Kecamatan Kutowinangun.

Selanjutnya dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya SKPD Kecamatan Kutowinangun berupaya memberdayakan segala sumberdaya yang ada.

Untuk itu, maka ditetapkan Rencana Strategis SKPD Kecamatan Kutowinangun yang dituangkan dalam bentuk Visi, Misi, tujuan, sasaran, kebijakan teknis program dan kegiatan.

Program Strategis SKPD Kecamatan Kutowinangun Kabupaten Kebumen merupakan langkah awal dalam penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) dan akan dipertanggungjawabkan pada setiap akhir tahun sebagai tolok ukur untuk menentukan keberhasilan atau ketidakberhasilan pelaksanaan seluruh program dan kegiatan yang dituangkan dalam Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) SKPD Kecamatan Kutowinangun.

1.2. Maksud dan Tujuan

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) dimaksudkan untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas dan fungsi SKPD Kecamatan Kutowinangun Kabupaten Kebumen tahun 2023 disamping sebagai bahan evaluasi pelaksanaan tugas dan fungsi pada tahun-tahun yang akan datang, oleh karena itu dalam laporan ini disajikan pula hasil pencapaian pelaksanaan sasaran dan kegiatan dengan menggunakan indikator yang telah ditetapkan sebagai tolok ukur kinerja.

Sedangkan tujuannya adalah untuk menyampaikan informasi mengenai kinerja SKPD Kecamatan Kutowinangun Kabupaten Kebumen, sebagai konsekwensi pelaksanaan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) ini diharapkan dapat menghasilkan masukan dari berbagai pihak dalam rangka memperbaiki kinerja SKPD Kecamatan Kutowinangun Kabupaten Kebumen.

1.3. Gambaran Umum Organisasi

SKPD Kecamatan Kutowinangun merupakan salah satu Kecamatan di Kabupaten Kebumen yang memiliki dataran tinggi dan sebagian dataran rendah dengan pemanfaatan potensi alam yang belum maksimal baik dari sektor pertanian maupun perkebunan.

Kecamatan Kutowinangun merupakan dataran rendah dan pegunungan yang sangat luas, terbentang pada 7⁰ - 8⁰ Lintang Selatan dan 109⁰ - 110⁰ Bujur Timur. dengan ketinggian 73 meter diatas permukaan laut.

Kecamatan Kutowinangun memiliki Luas wilayah 3.373 ha dimana luas tanah sawah 1.435.71 ha dan tanah kering 1.937,29 ha, terbagi

dalam 19 (Sembilan belas) desa, **jumlah penduduk** seluruhnya pada tahun 2023 : 52.549 jiwa, terdiri dari laki-laki : 26.762 jiwa dan perempuan 25.787 jiwa, dengan pertumbuhan penduduk sebesar 5,8% dari 52.549 jiwa pada tahun 2022, dimana berdasarkan topografi Kecamatan Kutowinangun merupakan dataran rendah dan sebagian pegunungan.

Secara administrasi Kecamatan Kutowinangun termasuk dalam wilayah administrasi Kabupaten Kebumen yang terletak sebelah timur ibu kota Kabupaten Kebumen dengan batas-batas administrasi sebagai berikut :

1. Sebelah Utara : Kecamatan Poncowarno
2. Sebelah Timur : Kecamatan Prembun
3. Sebelah Selatan : Kecamatan Ambal
4. Sebelah Barat : Kecamatan Kebumen

Potensi yang dapat dikembangkan, yaitu :

- a. Desa Pesalakan, Lumbu, Korowelang, Jlegiwinangun, Tanjungsari, Triwarno, Pekunden dan Tunjungseto bisa dikembangkan menjadi desa penghasil tanaman pertanian dan perkebunan. khususnya untuk desa Tunjungseto dapat dikembangkan sebagai lokasi wisata hutan, agro dan religius.
- b. Desa Kutowinangun, Kuwarisan, Lundong dikembangkan untuk kulliner jajanan khas kutowinangun.
- c. Desa Mekarsari, Mrinen dan Pejagatan dikembangkan Penghasil Gerabah rumah tangga.
- d. Desa Babadsari, Triwarno, Korowelang dapat dikembangkan sebagai daerah bibit tanaman sayuran, buah-buahan dan tanaman keras.
- e. Desa Ungaran, Karang Sari dapat dikembangkan dan dijadikan sentra perikanan air tawar dan pembibitan.

Dalam menjalankan tugas-tugas aparatur Kecamatan Kutowinangun melaksanakan fungsi-fungsi pemerintahan seperti penyelenggaraan pemerintah, pembangunan, kemasyarakatan termasuk didalamnya melaksanakan tugas pelayanan serta melaksanakan tugas yang didelegasikan oleh Bupati Kebumen kepada Camat. Camat dibantu oleh seorang Sekretaris Camat, 4 Kasi, 2 Kasubag dan 7 Staf. Selain itu, juga berkonsultasi dengan SKPD-SKPD tingkat kabupaten dan berkoordinasi dengan Forum Pimpinan Kecamatan Kutowinangun, serta perwakilan Instansi Kabupaten seperti UPT DPU, UPT Disperkim LH, UPT

Distanak UPT Puskesmas, KUA, Petugas Penyuluh BPPKB, PKH, Forum P3MD dan sebagainya.

1. Pembentukan SKPD Kecamatan Kutowinangun Kabupaten Kebumen berdasarkan pada peraturan-peraturan sebagai berikut :
 - 1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Propinsi Jawa Tengah;
 - 2) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten jo. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950;
 - 3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang - Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
 - 4) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 - 5) Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 - 6) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 5679);
 - 7) Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
 - 8) Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 6 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 126);

- 9) Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 127);

2. Tugas Pokok dan Fungsi SKPD Kecamatan Kutowinangun

Sesuai ketentuan Bab III pasal 4 Peraturan Bupati Kebumen Nomor 86 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Kecamatan, Kecamatan mempunyai tugas melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah yang dilimpahkan oleh Bupati.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 4, Kecamatan menyelenggarakan fungsi :

- a. Penyelenggaraan urusan pemerintahan umum;
- b. Pengkoordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat;
- c. Pengkoordinasian upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
- d. Pengkoordinasian penerapan dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah;
- e. Pengkoordinasian pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;
- f. Pengkoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh perangkat daerah di tingkat kecamatan;
- g. Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan kegiatan desa dan/atau kelurahan;
- h. Pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan;
- i. Perencanaan, pengoordinasian, pengendalian dan penyelenggaraan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan;
- j. Fasilitasi dan evaluasi penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;
- k. Pembinaan dan fasilitasi pengelolaan Badan Usaha Milik Desa;
- l. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Secara nyata kegiatan yang sudah dilaksanakan saat ini, diantaranya :

- a. Penyusunan Renstra OPD Kecamatan Kutowinangun;
 - b. Penyusunan Renja OPD Kecamatan Kutowinangun;
 - c. Pembuatan Perjanjian Kinerja Camat s.d Eselon IV;
 - d. Penyusunan KInerj Instansi Pemerintah (LKJiP) Tahun 2018;
 - e. Pembinaan Administrasi Desa;
 - f. Pembinaan dan fasilitasi penyusunan APBDDes;
 - g. Pembinaan dan fasilitasi penyusunan APBDDes Perubahan;
 - h. Pembinaan dan fasilitasi penyusunan Perdes tentang Laporan Pertanggungjawaban;
 - i. Pembinaan dan fasilitasi pembuatan Peraturan Kepala Desa tentang Laporan Keterangan Pertanggungjawaban;
 - j. Memfasilitasi penyelenggaraan Musrenbangdes;
 - k. Melaksanakan Musrenbangcam;
 - l. Memfasilitasi pelaksanaan Alokasi Dana Desa (ADD) dan dana Desa (DD);
 - m. Mengkoordinasikan BPNT;
 - n. Memfasilitasi pengangkatan Perangkat Desa;
 - o. Pembinaan dan intensifikasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB).
3. Peran SKPD Kecamatan Kutowinangun Kabupaten Kebumen dalam pelaksanaan Pembangunan Kecamatan Kutowinangun :
- a. Kelembagaan

Kecamatan merupakan perangkat daerah kabupaten sebagai pelaksana kewilayahan yang mempunyai wilayah kerja tertentu yang dipimpin oleh Camat yang berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Untuk melaksanakan Program dan Kegiatan yang ada maka SKPD Kecamatan Kutowinangun mengacu pada Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan dan Peraturan Bupati Kebumen Nomor 92 Tahun 2008 tentang Rincian Tugas pokok, fungsi dan Tata Kerja Kecamatan dengan memperhatikan Peraturan lain yang sesuai dengan Program dan Kegiatan yang ada. Disamping itu dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya SKPD Kecamatan Kutowinangun juga disesuaikan dengan Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kebumen Tahun 2021-2026, Rencana Kerja (Renja) SKPD

Kecamatan Kutowinangun Tahun 2021 dan Rencana Strategis (RENSTRA) Kecamatan Kutowinangun Kabupaten Kebumen Tahun 2021-2026.

Namun demikian dalam melaksanakan peran, tugas pokok dan fungsinya, Kecamatan Kutowinangun masih mengalami hambatan terutama pada sumber daya manusia dan perangkat penunjang lainnya.

b. Tata Kerja Kecamatan Kutowinangun

Kecamatan Kutowinangun dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 7 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Kecamatan. Camat, Sekretaris Camat, Kepala Seksi, Kepala Subbagian dan pemangku jabatan Fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi dalam kecamatan sesuai tupoksi masing-masing.

1.4. Susunan Kepegawaian

Jumlah Karyawan Kecamatan Kutowinangun sampai akhir bulan Desember 2023 sejumlah 15 (lima belas) orang dengan rincian berikut :

1) Berdasarkan golongan:

No	Golongan	Jumlah	Keterangan
1	IV/b	0	
2	IV/a	2	
3	III/d	4	
4	III/c	0	
5	III/b	3	
6	III/a	1	
7	II/d	3	
8	II/c	1	
9	II/b	1	
10	II/a	0	

2) Berdasarkan Ijazah

No	Ijazah	Jumlah	Keterangan
1	SD	0	
2	SMP	0	
3	S L T A	5	
4	Sarjana Muda	0	
5	Sarjana	7	
6	S2	1	
7	D3	2	
8	D2	0	

Sumber daya manusia di Kecamatan Kutowinangun masih terbatas jumlahnya termasuk kapasitas dan kapabilitasnya. Dengan bertambahnya jumlah penduduk dan kompleksitas permasalahan diwilayah Kecamatan, maka pemenuhan kebutuhan sumber daya manusia baik jumlah maupun kualitasnya perlu ditingkatkan.

Dengan begitu tugas dan permasalahan yang berada diwilayah namun sumber pendanaan sangat terbatas juga mengakibatkan berbagai macam pembinaan, pengkoordinasian dan fasilitasi kewilayahan berjalan kurang optimal. Untuk itu Sarana dan Prasarana untuk mendukung pelaksanaan pembinaan, fasilitasi, pengkoordinasian, dan pelayanan perlu ditingkatkan baik jumlah maupun kualitasnya.

Sumber daya yang diinginkan adalah terpenuhinya sumber daya manusia yang memadai dan berkualitas. Pemenuhan kebutuhan kualitas sumber daya manusia yang dapat melaksanakan tugas sesuai tupoksinya menjadi idaman semua pengelolaan kelembagaan.

Selain sumber daya manusia yang berkualitas juga diperlukan sarana prasarana yang memadai seperti ruang kerja yang sesuai dengan standar pelayanan dan sarana IT yang memadai. Untuk tahun 2023 pada SKPD Kecamatan Kutowinangun sudah tersedia IT, namun belum bisa digunakan secara maksimal padahal menjadi kebutuhan yang tidak dapat ditunda dalam rangka penyelesaian tugas secara kelembagaan.

Untuk memenuhi kebutuhan kualitas sumber daya manusia yang memadai perlu mengirimkan staf dalam pelatihan dan pendidikan untuk mencukupi sarana prasarana, maka diperlukan

sumber dana lain selain anggaran pemerintah daerah untuk kelancaran pelaksanaan tugas.

Struktur Organisasi SKPD Kecamatan Kutowinangun Kabupaten Kebumen antara lain sebagai berikut :

1. Camat

Camat mempunyai tugas memimpin pelaksanaan tugas dan fungsi Kecamatan.

2. Sekretariat

Sekretariat adalah unsur pembantu pimpinan yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Camat, Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan perumusan rencana, pengorganisasian, pelaksanaan kebijakan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan meliputi pembinaan ketatausahaan, keuangan, kerumahtanggaan, kerjasama, kearsipan, dokumen, keorganisasian dan ketatalaksanaan, kehumasan, kepegawaian, administrasi penanganan aduan dan pelayanan administrasi di lingkungan Kecamatan.

Subbagian pada Sekretariat dipimpin oleh Kepala Subbagian yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris Camat.

Subbagian pada Sekretariat Kecamatan Kutowinangun terdiri :

1) Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan

Mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan, pengordinasian, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan meliputi pengumpulan dan penyusunan bahan rencana program dan anggaran, pengelolaan data dan informasi, pengelolaan keuangan, penatausahaan keuangan, akuntansi dan pelaporan serta pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di lingkungan Kecamatan.

2) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

Mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan, pengordinasian, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan meliputi pembinaan ketatausahaan, kerumahtanggaan, pengelolaan barang milik daerah, kerjasama, kearsipan, dokumen, keorganisasian dan ketatalaksanaan, kehumasan, kepegawaian, administrasi penanganan aduan dan pelayanan administrasi di lingkungan Kecamatan.

3. Seksi Tata Pemerintahan

Mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pengordinasian, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan meliputi pembinaan dan pengawasan tertib administrasi pemerintahan desa dan/atau kelurahan, pemberian bimbingan, supervise, fasilitasi dan konsultasi pelaksanaan administrasi desa dan/atau kelurahan, pembinaan dan pengawasan terhadap kepala desa dan/atau lurah, pembinaan dan pengawasan terhadap perangkat desa dan/atau kelurahan, evaluasi penyelenggaraan pemerintahan desa dan/atau kelurahan di tingkat Kecamatan, fasilitasi dan evaluasi penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, pelapora pelaksanaan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan desa dan/atau kelurahan di tingkat Kecamatan kepada Bupati.

4. Seksi Ketentraman dan Ketertiban

Mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pengordinasian, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan meliputi koordinasi dengan Kepolisian Negara dan/atau TNI mengenai program penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum di wilayah kerja kecamatan, koordinasi dengan pemuka agama, koordinasi dengan perangkat daerah dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia yang melaksanakan tugas dan fungsi di bidang penegakan peraturan perundangan, dan pelaporan pelaksanaan penerapan dan penegakan peraturan perundangan di wilayah Kecamatan kepada Bupati.

5. Seksi Pemberdayaan Masyarakat

Mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pengordinasian, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan meliputi peningkatan partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan dalam forum musyawarah pembangunan di desa dan kecamatan, melakukan pembinaan dan pengawasan serta evaluasi terhadap unit kerja baik pemerintah maupun swasta yang mempunyai program dan kegiatan pemberdayaan masyarakat, pembinaan dan fasilitasi pengelolaan Badan Usaha Milik Desa, pelaporan pelaksanaan tugas pemberdayaan masyarakat di wilayah kerja Kecamatan kepada Bupati dengan tembusan perangkat daerah yang membidangi urusan pemberdayaan masyarakat.

6. Seksi Pelayanan Umum dan Kesejahteraan Sosial

Mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pengordinasian, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan meliputi pelayanan teknis Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan, percepatan pencapaian standar pelayanan minimal, pembinaan dan pengawasan serta evaluasi terhadap pelayanan masyarakat di wilayah kecamatan, koordinasi dengan perangkat daerah dan/atau instansi vertikal serta swasta yang melaksanakan tugas dan fungsi di bidang pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum, pelaporan pelaksanaan kegiatan pelayanan kepada masyarakat dan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum di wilayah Kecamatan kepada Bupati.

7. Kelompok Jabatan Fungsional

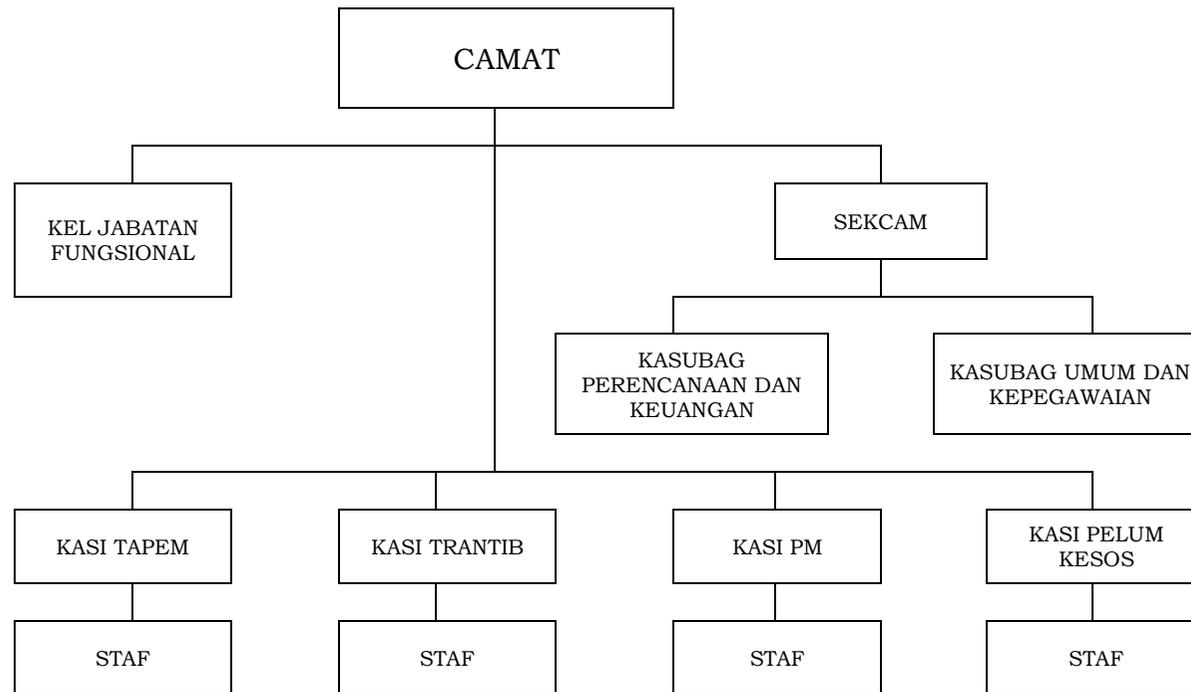
Kelompok jabatan fungsional dapat ditetapkan menurut kebutuhan yang mempunyai tugas pelaksanaan kegiatan sesuai jabatan fungsional masing-masing berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

**BAGAN STRUKTUR ORAGANISASI
SKPD KECAMATAN KUTOWINANGUN
KABUPATEN KEBUMEN**

PERATURAN BUPATI

NOMOR : 86 Tahun 2016

TANGGAL : 13 Desember 2016



1.5. Sistematika Penulisan

Sistematika Penulisan LKjIP SKPD Kecamatan Kutowinangun Kabupaten Kebumen Tahun 2023 menggunakan sistematika sebagai berikut:

Kata Pengantar

Daftar Isi

Daftar Tabel

Daftar Bagan

Bab.I : Pendahuluan

Bab.II : Perencanaan dan Perjanjian Kinerja

A. Rencana Strategis 2021-2026

B. Rencana Kinerja 2023

Bab.III : Akuntabilitas Kinerja

A. Capaian Kinerja Organisasi

B. Akuntabilitas Kinerja Keuangan

C. Efisiensi Anggaran

Bab.IV : Penutup

Lampiran-Lampiran

- DPA SKPD Kecamatan Kutowinangun Tahun 2023
- Perjanjian Kinerja setelah Perubahan
- Progress capaian triwulan
- Realisasi Keuangan dan Fisik 2023

BAB II

PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

2.1. Rencana Strategis 2021-2026

Sesuai tugas pokok dan fungsinya SKPD Kecamatan Kutowinangun Kabupaten Kebumen telah menyusun rencana strategis yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu lima tahun, yaitu periode 2021-2026 dengan memperhitungkan potensi, peluang dan kendala yang ada. Rencana Strategi SKPD Kecamatan Kutowinangun Kabupaten Kebumen yang mencakup visi, misi, tujuan dan sasaran serta strategi pencapaian sasaran akan diuraikan dalam bab ini. Sedangkan uraian sasaran target kinerja yang ingin dicapai pada tahun 2022 berikut program dan kegiatan pendukungnya akan dijelaskan dalam rencana kinerja tahun 2023 (terlampir).

Visi dan Misi SKPD Kecamatan Kutowinangun

Visi adalah gambaran ideal yang ingin dicapai dimasa mendatang atau cara pandang jauh kedepan kemana Instansi Pemerintah harus dibawa agar tetap eksis, antisipatif dan inovatif. Visi Kecamatan Kutowinangun mengacu pada Visi Bupati dan Wakil Bupati Kebumen.

Visi :

“Bersama Menuju Masyarakat Kebumen yang Sejahtera, Unggul, Berdaya, Agamis, dan Berkelanjutan”

Makna yang terkandung dalam visi tersebut dijabarkan sebagai berikut :

1. Bersama : Bermakna bahwa dalam rangka mencapai tujuan pembangunan, seluruh komponen masyarakat dan pemerintah bergerak bersama-sama dan saling menguatkan sebagai sebuah kesatuan yang kokoh dan sinergis;
2. Menuju : Bermakna bahwa dalam melaksanakan pembangunan senantiasa memiliki arah dan tujuan yang jelas dan terukur;
3. Sejahtera : Bermakna bahwa pembangunan harus diorientasikan untuk pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat berupa pangan, sandang, papan (perumahan), kesehatan, pendidikan dan sosial sehingga tercipta kemanusiaan yang adil dan beradab;

4. Unggul : Bermakna bahwa pembangunan yang dilaksanakan harus mampu mengembangkan dan menciptakan potensi daerah menjadi produk unggulan daerah yang berdaya saing tinggi;
5. Berdaya : Bermakna bahwa pembangunan yang dilaksanakan harus mampu menciptakan masyarakat yang memiliki kekuatan, kemampuan dan tenaga serta memiliki solusi terbaik dalam menyelesaikan segala persoalan yang dihadapi;
6. Agamis : Bermakna bahwa pembangunan yang dilaksanakan harus mampu menciptakan masyarakat yang berpegang teguh pada nilai-nilai keagamaan mengedepankan potensi intelektual dan rohaniah, yang dicirikan dengan sifat-sifat keimanan, ketakwaan, keadaban, keilmuan, kegigihan dalam kebaikan, kebenaran, dan persaudaraan;
7. Berkelanjutan : Bermakna bahwa seluruh pembangunan harus dilaksanakan secara komprehensif dan terintegrasi dengan baik serta memiliki keberlangsungan terus-menerus (berkesinambungan) sehingga tercipta pembangunan yang bermanfaat, berdaya guna bagi masyarakat dan berwawasan lingkungan.

Untuk mencapai visi tersebut diatas, maka dijabarkan dalam misi sebagai berikut:

Dalam rangka pencapaian visi yang telah ditetapkan dengan tetap memperhatikan kondisi dan permasalahan yang ada, tantangan ke depan, serta memperhitungkan peluang yang dimiliki, maka ditetapkan 6 (enam) misi sebagai berikut :

1. Membangun sumberdaya manusia yang memiliki wawasan luas, tangguh serta berkemajuan melalui pendidikan dan kesehatan yang berkualitas;
2. Peningkatan kesejahteraan dan perlindungan sosial masyarakat dengan melakukan pemerataan dan penyeimbangan pembangunan secara berkelanjutan untuk mengurangi kesenjangan ekonomi, sosial, politik dan budaya serta melakukan pembangunan yang bukan terfokus hanya pada aspek fisik saja tetapi juga aspek non fisik berupa pengembangan potensi intelektual, rohaniah, intuisi, kata hati, akal sehat, fitrah dan yang bersifat batin lainnya dalam bingkai kebersamaan dan sinergitas antar elemen masyarakat;

3. Mengembangkan kemandirian perekonomian daerah yang bertumpu pada pengembangan potensi lokal unggulan melalui sinergi fungsi-fungsi pertanian, industri, pariwisata dan sektor lainnya, dengan penekanan pada peningkatan pendapatan masyarakat dan penciptaan lapangan kerja serta berwawasan lingkungan;
4. Meningkatkan perekonomian daerah memiliki daya saing tinggi berbasis pertanian, industri, perikanan, pariwisata dan budaya melalui proses pembangunan ekonomi yang berkesinambungan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan dan mengurangi kemiskinan;
5. Menyediakan sarana dan prasarana pendidikan yang baik, meningkatkan nilai kualitas pendidikan serta membuka akses kesehatan yang maksimal dan terjangkau bagi seluruh lapisan masyarakat; dan
6. Memperkuat sekaligus meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih serta mampu menciptakan iklim pelayanan publik yang maksimal (*Good and Clean Government*) dengan jalan menciptakan kualitas pelayanan publik, sistem kelembagaan dan ketatalaksanaan pemerintah daerah yang bersih, efisien, efektif, profesional, transparan dan akuntabel, yang didukung dengan sistem pengawasan yang efektif guna menekan perilaku korupsi, kolusi serta meningkatkan pengetahuan, pemahaman dan pendalaman agama.

Dari 6 misi tersebut, Kecamatan Kutowinangun dalam menjalankan tugas dan fungsinya terkait dengan misi 1, 2, 3, 4 dan 6 yang diimplementasikan ke dalam program dan kegiatan pembangunan.

2.2. Rencana Kinerja 2023

Setiap sasaran strategis dijabarkan lebih lanjut ke dalam sejumlah program. Dalam suatu program terdapat sejumlah kegiatan yang memiliki kesamaan perspektif dikaitkan dengan maksud, tujuan, dan karakteristik program. Penetapan program dimaksudkan untuk memberikan fokus pada penyusunan kegiatan dan pengalokasian sumber daya organisasi. Dengan demikian kegiatan merupakan penjabaran lebih lanjut dari program, yang secara rinci dapat diuraikan dalam tabel berikut :

MATRIK PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN 2023

Perencanaan, Penganggaran, Perangkat dan evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1. 2.	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah.
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1. 2.	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD
Administrasi Umum Perangkat Daerah	1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Penyediaan Bahan Logistik Kantor Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Penyediaan Bahan /Material Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD. Penatausahaan Arsip pada SKPD.
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	1. 2. 3. 4.	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan. Pengadaan Peralatan dan Mesin lainnya. Pemeliharaan Mebel. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya.
Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang dilimpahkan kepada Camat	1.	Pelaksanaan Urusan Pemeintahan yang terkait dengan Nonperizinan
Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	1.	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemerintahan dan Pemeliharaan Keutuhan NKRI.
Fasilitasi Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	1. 2. 3. 4.	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa. Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa. Fasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa. Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya.

Kinerja SKPD Kecamatan Kutowinangun Kabupaten Kebumen tahun 2023 tercermin dalam pencapaian sasaran yang dilaksanakan melalui berbagai program dan kegiatan. Pencapaian Kinerja seluruh sasaran tahun 2023 adalah sebagai berikut :

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

NO	URAIAN	ANGGARAN (Rp.)	REALISASI (Rp.)	%
	BELANJA LANGSUNG			
1.	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	500.000	500.000	100%
	Belanja Barang dan Jasa			
2.	Penyediaan Jasa Komunikasi, SDA dan Listrik	15.000.000	10.576.294	70.51%
	Belanja Barang dan Jasa			
3.	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	18.100.000	18.096.600	99.98%
	Belanja Barang dan Jasa			
4.	Penyediaan Jasa Pemeliharaaa, Biaya Pemeliharaan Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	21.298.000	21.104.698	99.09%
	Belanja Barang dan Jasa			
5.	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	3.990.000	3.990.000	100 %
	Belanja Barang dan Jasa			
6.	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	8.882.000	8.882.000	100 %
	Belanja Barang dan Jasa			
7.	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	98.786.000	98.694.900	99.91%
	Belanja Barang dan Jasa			
8.	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	3.750.000	3.750.000	100%
	Belanja Barang dan Jasa			
9.	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik	1.600.000	1.597.300	99.83%
	Belanja Barang dan Jasa			
10.	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	1.200.000	1.200.000	100 %
	Belanja Barang dan Jasa			
11.	Penyediaan Logistik Kantor	10.100.000	10.092.500	99.93%
	Belanja Barang dan Jasa			
12.	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	2.000.000	1.984.500	99.23%
13.	Pemeliharaan Mebel	2.650.000	2.650.000	100%

2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

NO	URAIAN	ANGGARAN (Rp.)	REALISASI (Rp.)	%
	BELANJA LANGSUNG			
1.	Pengadaan Mebeleur	0	0	%
2.	Pengadaan Sarana dan Prsarana Gedung Kantor/Bangunan lainnya	0	0	0
3.	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung kantor	0	0	00.00%

3. Program Pengembangan Data/Informasi

NO	URAIAN	ANGGARAN (Rp.)	REALISASI (Rp.)	%
	BELANJA LANGSUNG			
1.	Penyusunan dan pengumpulan data/ informasi kebutuhan penyusunan dokumen perencanaan	5.700.000	5.579.750	97.89%

4. Program Pengembangan Data/ Informasi/ Statistik Daerah

NO	URAIAN	ANGGARAN (Rp.)	REALISASI (Rp.)	%
	BELANJA LANGSUNG			
1.	Penyusunan Data Base dan Profil Desa/Kecamatan	-	-	00.00%

5. Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa

NO	URAIAN	ANGGARAN (Rp.)	REALISASI (Rp.)	%
	BELANJA LANGSUNG			
1.	Pengkajian dan pengembangan informasi	-	-	00.00%

6. Program Peningkatan dan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan

NO	URAIAN	ANGGARAN (Rp.)	REALISASI (Rp.)	%
	BELANJA LANGSUNG			
1.	Kegiatan Pelatihan Anggota Linmas	-	-	00.00%

7. Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Desa

NO	URAIAN	ANGGARAN (Rp.)	REALISASI (Rp.)	%
	BELANJA LANGSUNG			
1.	Fasilitasi Pemilihan Kepala Desa/Perangkat Desa	3.000.000	2.975.300	99.18%
2.	Fasilitasi Program Pembangunan Pedesaan	4.500.000	4.469.300	99.32%

8. Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial

NO	URAIAN	ANGGARAN (Rp.)	REALISASI (Rp.)	%
	BELANJA LANGSUNG			
1.	Fasilitasi TKP2KDes/Kel	0	0	0%

9. Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Pedesaan

NO	URAIAN	ANGGARAN (Rp.)	REALISASI (Rp.)	%
	BELANJA LANGSUNG			
1.	Peningkatan Perekonomian Berbasis Pengembangan Wilayah	-	-	00.00%

10. Program Peningkatan Peran Serta Kepemudaan

NO	URAIAN	ANGGARAN (Rp.)	REALISASI (Rp.)	%
	BELANJA LANGSUNG			
1.	Pembinaan Organisasi Kepemudaan	-	-	00.00%

11. Program Pengelolaan Keragaman Budaya

NO	URAIAN	ANGGARAN (Rp.)	REALISASI (Rp.)	%
	BELANJA LANGSUNG			
1.	Fasilitasi Perkembangan Keragaman Budaya Daerah	-	-	-%

12. Program pengembangan wawasan Kebangsaan

NO	URAIAN	ANGGARAN (Rp.)	REALISASI (Rp.)	%
	BELANJA LANGSUNG			
1.	Peningkatan kesadaran masyarakat akan nilai-nilai luhur budaya bangsa	33.370.000	33.219.000	99.55%

13. Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Desa

NO	URAIAN	ANGGARAN (Rp.)	REALISASI (Rp.)	%
	BELANJA LANGSUNG			
1.	Fasilitasi APBDes	24.210.000	24.090.200	99.24%
2.	Fasilitasi Program Pembangunan	4.500.000	4.395.000	97.67%

14. Program Peningkatan Peran Perempuan di Perdesaan

NO	URAIAN	ANGGARAN (Rp.)	REALISASI (Rp.)	%
	BELANJA LANGSUNG			
1.	Pembinaan TP PKK Kecamatan dan Desa Binaan	7.111.000	7.111.000	100 %

15. Program peningkatan sistim pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH

NO	URAIAN	ANGGARAN (Rp.)	REALISASI (Rp.)	%
	BELANJA LANGSUNG			
1.	Fasilitasi Penyelenggaraan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN)	98.786.000	98.694.900	99.91%

16. Program Perencanaan Pembangunan Daerah

NO	URAIAN	ANGGARAN (Rp.)	REALISASI (Rp.)	%
	BELANJA LANGSUNG			
1.	Penyelenggaraan Musrenbangcam	24.210.000	24.090.200	99.91%
2.	Rakor dan Inventarisasi Program Proyek Masuk Desa (IPMD)	-	-	-%

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas Kinerja SKPD Kecamatan Kutowinangun Kabupaten Kebumen adalah perwujudan kewajiban SKPD Kecamatan Kutowinangun Kabupaten Kebumen untuk mempertanggung jawabkan keberhasilan maupun kegagalan pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya dalam mencapai sasaran yang telah ditetapkan pada tahun 2023.

Kinerja SKPD Kecamatan Kutowinangun Kabupaten Kebumen tahun 2023 tergambar dalam tingkat pencapaian sasaran yang dilaksanakan melalui berbagai kegiatan sesuai dengan program dan kebijakan yang telah ditetapkan. Pada bab ini akan disajikan uraian hasil pengukuran kinerja, analisis dan evaluasi akuntabilitas kinerja, termasuk didalamnya keberhasilan dan kegagalan, hambatan/kendala dan permasalahan yang dihadapi serta langkah langkah mengatasi hambatan/kendala dan permasalahan.

3.1. Capaian Kinerja Organisasi

Pengukuran kinerja digunakan sebagai dasar untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan Sasaran dan Tujuan dalam rangka mewujudkan Visi dan Misi yang telah ditetapkan. Salah satu syarat utama untuk dapat dilakukan pengukuran kinerja adalah telah ditetapkan indikator kinerja pada tingkat Sasaran dan Kegiatan. Indikator kinerja ini sangat bermanfaat untuk memantau kinerja organisasi, karena secara efektif dapat membedakan keberhasilan dengan kegagalan.

Kriteria yang dipakai dalam pengukuran kinerja adalah target kinerja yang telah ditetapkan dalam Perencanaan Kinerja yang seharusnya dibuat pada awal tahun anggaran. Target kinerja ini merupakan komitmen dari Sekretariat daerah Kabupaten Kebumen untuk mencapai hasil yang diinginkan dari setiap Sasaran dan Kegiatan yang dilaksanakan. Langkah selanjutnya, pada akhir tahun target kinerja tersebut dibandingkan dengan realisasinya untuk mengetahui selisih perbedaan/celah kinerja yang terjadi. Selisih yang timbul kemudian dianalisis guna menetapkan perbaikan strategi untuk peningkatan kinerja di masa datang.

Untuk mendapatkan data kinerja yang akurat, lengkap, konsisten dan tepat waktu, Kecamatan Kutowinangun mulai membangun sistem

informasi pengumpulan data kinerja dengan memanfaatkan sistem pelaporan reguler yang sudah ada dan mempertimbangkan prinsip keseimbangan biaya dan manfaat, serta efisiensi dan efektivitasnya.

Pengukuran kinerja ini mencakup :

1. Kinerja Kegiatan yang merupakan tingkat Capaian (rencana tingkat capaian) dari masing-masing kelompok indikator kinerja kegiatan, dan
2. Tingkat Capaian Sasaran yang merupakan tingkat Capaian (rencana tingkat capaian) dari masing-masing indikator sasaran yang telah ditetapkan.

Pengukuran tingkat sasaran secara langsung maupun tidak langsung didasarkan pada hasil pengukuran kinerja Kegiatan yang diukur dari hasil Capaian indikator kinerja masukan, keluaran, hasil, manfaat dan dampak, dengan penjelasan sebagai berikut :

- a. Masukan (*inputs*) adalah segala sesuatu yang dibutuhkan agar pelaksanaan kegiatan dan program dapat berjalan atau dalam rangka menghasilkan *output*, misalnya sumber daya manusia, dana, material, waktu, teknologi, dan sebagainya;
- b. Keluaran (*outputs*) adalah segala sesuatu berupa produk/jasa (fisik dan/atau non fisik) sebagai hasil langsung dari pelaksanaan suatu kegiatan program berdasarkan masukan yang digunakan;
- c. Hasil (*outcomes*) adalah segala sesuatu yang mencerminkan berfungsinya keluaran kegiatan pada jangka menengah. *Outcomes* merupakan ukuran seberapa jauh setiap produk/jasa dapat memenuhi kebutuhan dan harapan masyarakat;
- d. Manfaat (*benefits*) adalah kegunaan suatu keluaran (*outputs*) yang dirasakan langsung oleh masyarakat. Dapat berupa tersedianya fasilitas yang dapat diakses oleh publik;
- e. Dampak (*impacts*) adalah ukuran tingkat pengaruh sosial, ekonomi, lingkungan atau kepentingan umum lainnya yang dimulai oleh capaian indikator dalam suatu kegiatan.

Indikator yang dipakai dalam pengukuran kinerja ini meliputi indikator *input*, *output* dan *outcome*. Untuk indikator kinerja *benefit* dan *impact* telah diidentifikasi namun belum diukur kinerjanya secara tepat, sehingga belum dilaporkan dalam LKjIP Tahun 2023 ini sehubungan dengan kenyataan bahwa indikator tersebut baru dapat diidentifikasi pada beberapa tahun mendatang setelah selesainya suatu program/kegiatan.

Media yang digunakan dalam rangka pengukuran kinerja dimaksud yaitu dengan menggunakan formulir Pengukuran Kinerja. Di samping itu suatu Sasaran tidak lagi hanya Sasaran spesifik yang menjadi tanggung jawab satu unit kerja, tetapi suatu Sasaran dapat berupa Sasaran yang Capaiannya harus merupakan hasil hubungan sebab akibat atau sinergi dari kinerja kegiatan-kegiatan berbagai unit kerja.

Untuk mempermudah interpretasi atas Capaian sasaran dan indikator makro diberlakukan nilai disertai makna dari nilai tersebut yaitu:

Tabel. 3.1 Rentang Capain.

No	Rentang Capaian	Kategori Capaian
1	Lebih dari 100%	Baik Sekali (BS)
2	Lebih dari 85% sd. 100%	Baik (B)
3	Lebih dari 65 % sd. 85%	Cukup (C)
4	Lebih dari 50% s.d 60 %	Kurang (K)
5	Kurang dari 50 %	Sangat Kurang (SK)

Selanjutnya kinerja penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan tahun 2023 ditunjukkan dalam 1 (satu) sasaran dengan 1 (satu) indikator kinerja. Adapun selengkapnya tingkat capaian kinerja sasaran tersebut dengan sebagaimana tersebut tabel di bawah ini:

Tabel 3. 2 Pengukuran Capaian Kinerja Tahun 2023

No	Sasaran	Indikator Sasaran	Target	Realisasi	% Capaian Kinerja
	Tujuan				
	Mewujudkan Kualitas Pelayanan Publik	Indeks Kepuasan Masyarakat	86	89,23	103,76%
	Sasaran				
1	Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik	Indeks Kepuasan Masyarakat Kecamatan Kutowinangun	86,50	93,77	108,40%

3.2. Evaluasi dan Analisis Akuntabilitas Kinerja

Dari hasil pengukuran kinerja, selanjutnya dilakukan evaluasi terhadap capaian indikator sasaran kegiatan untuk mengetahui capaian realisasi, kemajuan dan kendala yang dijumpai pada saat pelaksanaan kegiatan dalam rangka mencapai sasaran yang telah ditetapkan. Apabila dalam realisasi capaian kinerja ternyata terjadi perbedaan/celah kinerja dari yang ditargetkan, maka terhadap celah kinerja tersebut juga

dilakukan evaluasi kinerja untuk mendapatkan umpan balik guna perbaikan pelaksanaan program/kegiatan di tahun-tahun berikutnya.

Analisis akuntabilitas kinerja yang dilakukan mencakup uraian keterkaitan capaian kinerja kegiatan dengan program, kebijakan dan sasaran dalam rangka mewujudkan tujuan, misi dan visi yang telah ditetapkan. Maksud dari dilakukannya analisis akuntabilitas kinerja antara lain agar Laporan Akuntabilitas Kinerja Kecamatan Kutowinangun Kabupaten Kebumen tahun 2023 dapat menyajikan informasi yang relevan bagi pengambilan keputusan dalam menginterpretasikan kegagalan dan keberhasilan secara lebih luas dan mendalam.

Kinerja Kecamatan Kutowinangun Kabupaten Kebumen pada tahun 2023 tercermin dari capaian kinerja sasaran Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik dengan indikator sasaran indeks kepuasan masyarakat.

Survei Kepuasan Masyarakat dilaksanakan berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB) Nomor 14 tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik yang mengacu kepada Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik mengamanatkan kepada seluruh unit pelayanan institusi pemerintah, baik di tingkat pusat maupun daerah, untuk melakukan Survey Kepuasan Masyarakat sebagai tolak ukur keberhasilan penyelenggaraan pelayanan publik.

Nilai persepsi, nilai interval, mutu pelayanan dan Kinerja Unit Pelayanan didasarkan pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017 sebagai berikut :

Tabel 2.1

Nilai Persepsi, Nilai Interval, Nilai Interval Konversi, Mutu Pelayanan dan Kinerja Unit Penyelenggara Pelayanan Publik (UPP)

Tabel 3.3

NILAI PERSEPSI	NILAI INTERVAL	NILAI INTERVAL KONVERSI	MUTU PELAYANAN	KINERJA UPP
1	1,00 – 2,599	25,00 – 64,99	D	Tidak baik
2	2,60 – 3,064	65,00 – 76,60	C	Kurang baik
3	3,064 – 3,532	76,61 – 88,30	B	Baik
4	3,532 – 4,00	88,31 – 100,00	A	Sangat baik

Sumber data : Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik.

Capaian indikator sasaran diukur dengan memperhatikan sembilan unsur dalam survei kepuasan masyarakat, adapun realisasi indeks kepuasan masyarakat Kecamatan Kutowinangun Kabupaten Kebumen Tahun 2023 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3. 4 Perbandingan Capaian Kinerja Indeks Kepuasan Masyarakat

No	Indikator sasaran	Realisasi 2022	Tahun 2023			Target akhir 2026	Tingkat Kemajuan
			Target	Realisasi	% Capaian		
1	2	3	4	5	6 (5/4)	7	8 (5/7)
1.	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	85,63	86,50	93,77	108,40%	90%	104,19%

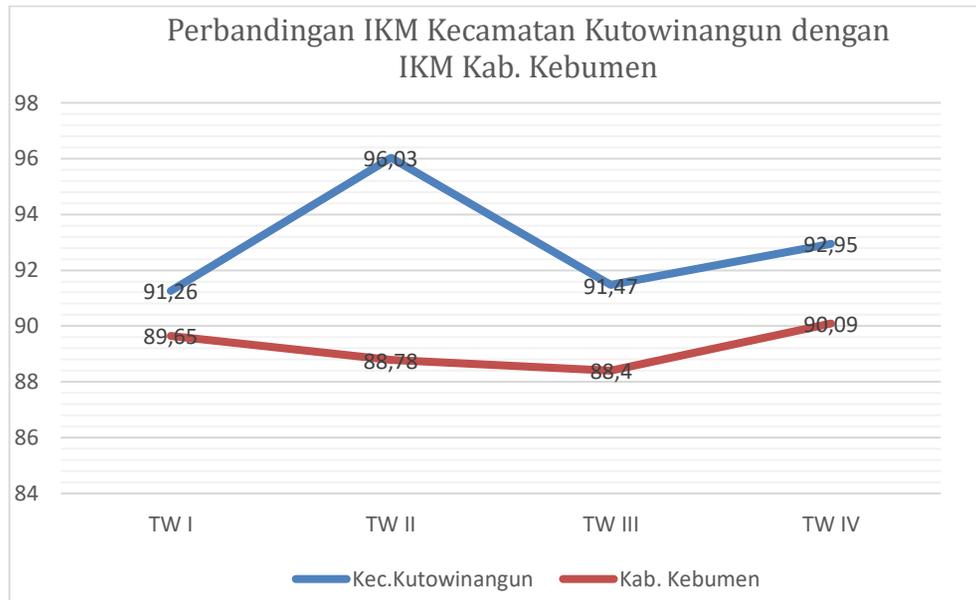
Sumber : .data IKM 2023

Realisasi IKM tahun 2023 (93,77) lebih tinggi apabila dibandingkan realisasi IKM tahun 2022 (85.63) dikarenakan pada tahun 2023 dari responden berbagai usia dan pendidikan.

Capaian Kinerja Indeks Kepuasan Masyarakat Kecamatan Kutowinangun Kabupaten Kebumen tahun 2023 sebesar 108,40% atau kategori capaian kinerja **Sangat Baik**. Sedangkan apabila realisasi tahun 2023 dibandingkan target akhir 2026 telah berhasil mencapai Tingkat Kemajuan 104,19%.

Sedangkan Perbandingan Perkembangan Realisasi IKM Kabupaten Kebumen dengan IKM Sekretariat Daerah dari Triwulan I s.d. IV dapat digambarkan melalui grafik sebagai berikut:

Grafik 3.1 Perbandingan IKM



IKM Triwulanan Kecamatan Kutowinangun jika dibandingkan dengan IKM Triwulanan Kabupaten Kebumen Tahun 2023 mengalami kenaikan pada Triwulan II lebih tinggi dari IKM Kabupaten pada Triwulan I, III dan IV dengan demikian realisasi IKM Kecamatan Kutowinangun diatas target yang ditentukan atau masuk kategori kinerja Unit Pelayanan sangat Baik.

Adapun rincian nilai dari masing-masing unsur dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3.5 Perbandingan Nilai masing-masing Unsur IKM Kecamatan Kutowinangun dengan IKM Kecamatan yang lain Tahun 2022

No	Unsur	Nilai Kecamatan Kutowinangun		Nilai Kecamatan Poncowarno		Nilai Kecamatan Ambal		Nilai Kecamatan Prembun	
		Nilai	Kategori UPP	Nilai	Kategori UPP	Nilai	Kategori UPP	Nilai	Kategori UPP
1	Persyaratan	94.59	Sangat Baik	94.09	Sangat Baik	86.87	Baik	87,9	Baik
2	Prosedur	93.36	Sangat Baik	93.33	Sangat Baik	83.74	Baik	87,5	Baik
3	Waktu Pelayanan	90.72	Sangat Baik	86.68	Baik	82.87	Baik	85,79	Baik
4	Biaya/Tarif	99.17	Sangat Baik	99.24	Sangat Baik	98.31	Sangat Baik	98,36	Sangat Baik
5	Produk Layanan	92.91	Sangat Baik	90.77	Sangat Baik	84.13	Baik	87,1	Baik
6	Kompetensi Pelaksana	93.19	Sangat Baik	92.06	Sangat Baik	83.96	Baik	88,22	Baik
7	Perilaku Pelaksana	93.82	Sangat Baik	88.83	Baik	83.74	Baik	87,81	Baik
8	Sarana dan Prasarana	92.85	Baik	79.87	Baik	82.42	Baik	86,73	Baik
9	Penanganan Pengaduan	94.10	Sangat Baik	98.40	Sangat Baik	97.21	Sangat Baik	95,59	Sangat Baik

Dari tabel di atas dapat diketahui nilai masing-masing IKM Kecamatan rata-rata kategori **Baik**, memperhatikan nilai masing-masing unsur di atas unsur yang masih perlu perbaikan adalah unsur Waktu Pelayanan, Prosedur dan Persyaratan.

Adapun rencana tindak lanjut masing-masing unsur yang perlu perbaikan sebagai berikut:

1. Unsur Waktu Pelayanan rencana tindak lanjut perbaikannya adalah mempublikasi dan memampang waktu pelayanan di ruang pelayanan publik dan melalui website, media sosial (*facebook, instagram, twitter*).
2. Unsur Prosedur tindak lanjut perbaikannya adalah menetapkan dan mempublikasikan standar pelayanan dan tertib administrasi dalam pelaksanaan sesuai ketentuan.
3. Unsur Persyaratan tindak lanjut perbaikannya adalah Keterbukaan informasi publik pada persyaratan pelayanan publik untuk senantiasa *up date* dilakukan publikasi kepada masyarakat/ pengguna layanan.

3.3. Akuntabilitas Kinerja Keuangan

Akuntabilitas kinerja keuangan Sekretariat Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2023 dapat diketahui dari keterkaitan sasaran dengan Program/ Kegiatan Pendukung dan Analisis Efisiensi realisasi anggaran yang digunakan untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan selama Tahun 2023. Secara lebih rinci sebagai berikut:

3.3.1. Keterkaitan Sasaran dan Program/ Kegiatan

Keterkaitan Sasaran dengan Program/ Kegiatan pendukung dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.6 Keterkaitan Sasaran dan Program/ Kegiatan Pendukung

Tujuan/ Sasaran	Indikator Kinerja	% Capaian	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	% Capaian	Menunjang/ Tidak Menunjang
Tujuan						
Mewujudkan Kualitas Pelayanan Publik	Indeks Kepuasan Masyarakat	103,76%				
Sasaran						
Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik	Indeks Kepuasan Masyarakat Kecamatan Kutowinangun	108,40%	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan pelayanan urusan penunjang pemerintah Daerah	100%	Menunjang

Tujuan/ Sasaran	Indikator Kinerja	% Capaian	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	% Capaian	Menunjang/ Tidak Menunjang
			Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang disusun	94.04%	Menunjang
			Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	96,6%	Menunjang
			Administrasi Umum Perangkat Daerah	Prosentase terlaksananya kegiatan Administrasi umum perangkat daerah	99.52%	Menunjang
			Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Prosentase layanan Penyediaan jasa Penunjang urusan pemerintahan daerah	86.42%	Menunjang
			Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang sesuai ketentuan	99.48%	Menunjang
			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	CAKUPAN PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN	99.18%	Menunjang

Tujuan/ Sasaran	Indikator Kinerja	% Capaian	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	% Capaian	Menunjang/ Tidak Menunjang
				PUBLIK		
			Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Prosentase layanan urusan Pemerintahan yang dilimpahkan kepada Camat yang sesuai ketentuan	99.91%	Menunjang
			PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	CAKUPAN PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	100%	Menunjang
			Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Jumlah penyelenggaraan Pemerintahan Umum sesuai penugasan Kepala Daerah	100%	Menunjang
			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	CAKUPAN PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	97.17%	Menunjang
			Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Jumlah fasilitasi rekomendasi dan koordinasi pengawasan Pemerintahan Desa	99,04%	Menunjang
				Rata-rata	96.53%	

Dari tabel keterkaitan Sasaran dan Program Kegiatan pada Kecamatan Kutowinangun Kabupaten Kebumen Tahun 2023 dapat

disimpulkan bahwa dari 4 (empat) Program dan 8 (delapan) Kegiatan dengan rata-rata capaian kinerja 108.40% dapat disimpulkan bahwa program dan kegiatan yang ada pada Kecamatan Kutowinangun Kabupaten Kebumen telah berhasil menunjang tercapainya sasaran kinerja.

3.4. Efisiensi Anggaran

Pengukuran efisiensi dilakukan dengan membandingkan penjumlahan dari selisih antara perkalian pagu anggaran keluaran dengan capaian keluaran dan realisasi anggaran keluaran dengan penjumlahan dari perkalian pagu anggaran keluaran dengan capaian keluaran sebagaimana dijelaskan dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 214/PMK.02/2017 Tentang Pengukuran dan Evaluasi Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/ Lembaga.

Realisasi Anggaran secara lebih rinci dapat dilihat dalam lampiran yang menjadi satu kesatuan dari laporan kinerja, sedangkan efisien anggaran dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.7 Efisiensi Anggaran Kecamatan Kutowinangun
Kabupaten Kebumen Tahun 2023

Tujuan/ Sasaran	Target	Realisasi	% Capaian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	% Capaian	Tingkat Efisiensi
Tujuan							
Mewujudkan Kualitas Pelayanan Publik	86	89,23	103,76%				
Sasaran							
Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik	86,50	93,77	108,40%	2.134.140.000	2.067.638.973	96.88%	3.12%

Dari tabel di atas dapat disimpulkan efisiensi anggaran Kecamatan Kutowinangun Kabupaten Kebumen mempunyai nilai cukup baik berada pada angka 3,12% dari pagu anggaran neto (dari rentang nilai efisiensi antara - 5% sampai dengan 10%).

Ditinjau dari aspek efisiensi, Kecamatan Kutowinangun Kabupaten Kebumen telah melaksanakan program dan kegiatan dengan baik. Adapun permasalahan yang perlu ditindaklanjuti Kecamatan Kutowinangun Kabupaten Kebumen adalah dalam pelaksanaan anggaran kedepan adalah untuk membuat daftar pelaksanaan anggaran s.d. akhir

tahun dan memastikan seluruh perencanaan penganggaran dapat dilaksanakan sesuai jadwal yang telah ditentukan.

BAB IV

PENUTUP

4.1. KESIMPULAN

Keberhasilan atas pencapaian target dari rencana kinerja yang ditetapkan tidak lepas dari peran serta semua pihak yang terlibat di dalamnya. Keberhasilan tersebut merupakan cerminan dari telah berjalannya sistem kerja yang berlaku.

Capaian kinerja Kecamatan Kutowinangun Kabupaten Kebumen dengan indikator indeks kepuasan masyarakat mencapai target kinerja yang telah ditetapkan dengan realisasi IKM sebesar 93,77 atau capaian kinerja sebesar 108,40% dengan kategori kinerja sangat baik.

Keterkaitan Sasaran dan Program/kegiatan menunjukkan bahwa dari 4 (empat) program dan 8 (delapan) kegiatan dengan rata-rata capaian kinerja kegiatan 97% semuanya menunjang tercapainya sasaran strategis Kecamatan Kutowinangun Kabupaten Kebumen.

Realisasi IKM tahun 2023 (93,77) sedikit lebih tinggi apabila dibandingkan realisasi IKM tahun 2022 (85,63) dikarenakan pada tahun 2023 jumlah sampel responden sudah diambil dari berbagai latar belakang Pendidikan, usia dan jenis kelamin.

4.2. SARAN

Indek Kepuasan Masyarakat (IKM) rata-rata kategori Sngat Baik, memperhatikan nilai masing-masing unsur di atas unsur yang masih perlu perbaikan adalah unsur Waktu Pelayanan dan Sarana Prasarana dan Produk Layanan.

Adapun rencana tindak lanjut yang perlu perbaikan sebagai berikut :

1. Unsur Waktu Pelayanan rencana tindak lanjut perbaikannya adalah mempublikasi dan memampang waktu pelayanan di ruang pelayanan publik dan melalui website dan penyampaian ke Desa dan menempatkan petugas yang dipelayanan yang kompeten.
2. Unsur Saran dan Prasarana untuk menunjang kelancaran pelayanan ditingkatkan Kembali.
3. Unsur produk layanan seperti KK,KTp dan surat pindah harus lebih baik dan ditingkatkan

LKjIP Kecamatan Kutowinangun Kabupaten Kebumen Tahun 2023 ini diharapkan mampu meningkatkan profesionalisme dan kinerja aparatur daerah serta mewujudkan *good and clean governance* sehingga mampu mendukung keberhasilan pembangunan di Pemerintah Kabupaten Kebumen.

Akhirnya, secara umum dapat disimpulkan bahwa pencapaian target terhadap beberapa indikator yang dicantumkan dalam Renstra Kecamatan Kebumen Kabupaten Kebumen Tahun 2021-2026 khususnya untuk tahun anggaran 2023, dapat dipenuhi sesuai harapan. Jika terdapat indikator yang belum memenuhi target yang ditetapkan, Kami akui semata-mata merupakan kelemahan dan ketidaksempurnaan sebagai manusia, karena disadari kesempurnaan hanyalah milik Allah Ta'ala, namun demikian segala kekurangan dan ketidaksempurnaan tentunya harus menjadi motivasi untuk lebih baik lagi di esok hari.

Kebumen, 19 Januari 2024

KAMAT KUTOWINANGUN


BAWONO ANDI WIDODO, S.STP
Pembina
NIP. 19810302 199912 1 001

Lampiran-Lampiran

- DPA SKPD Kecamatan Kutowinangun Tahun 2023
- Perjanjian Kinerja
- Progress capaian triwulan 1 s.d 4
- Realisasi Keuangan dan Fisik 2023

**PROGRES PENCAPAIAN KINERJA (PENGUKURAN KINERJA)
PENGUKURAN KINERJA TRIWULAN I TAHUN 2023
KECAMATAN KUTOWINANGUN KABUPATEN KEBUMEN**

1. CAMAT

NO	SASARAN SETRATEGIS	INDIKATOR	TARGET	REALISASI TW				REALISASI S/D TRIWULAN INI	CAPAIAN	PERMASALAHAN	SOLUSI
				I	II	III	IV				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik Kecamatan Kutowinangun	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kecamatan Kutowinangun	86.50%	13.85%	0.00%			13.85%	16%	Untuk pelayanan PATEN kadang terkendala dengan server rusak, blangko habis, jaringan rusak dll .	Berkordinasi ke Disdukcapil dan Keminfo untuk penyediaan blanko atau untuk menstabilkan jaringan
2	Meningkatnya Perencanaan, Administrasi umum, keuangan dan kepegawaian	Persentase terselenggaranya Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	100%	35%	0.00%			34.78%	34.78%	Target Realisasi keuangan dan fisik baru tercapai 48.80%	Berkordinasi dengan PPTK agar mencermati anggaran kas pada bulan berjalan.
3	Meningkatnya Kondusifitas Kecamatan Kutowinangun	Indek kondusifitas Kecamatan	100%	16%	0%			16%	16%	Keadaan kondusif tidak ada kejadian yang menonjol	Selalu berkordinasi dengan forkopimcam
4	Meningkatnya Desa membangun kategori maju dan mandiri	Presentase Desa dengan indek Desa membangun kategori maju dan mandiri	100%	39%	0%			39%	39%	Secara umum Desa lagi dalam proses membangun	Indek Desa Membangun Kategori maju 8 Mandiri 2 berkembang 9

**PROGRES PENCAPAIAN KINERJA (PENGUKURAN KINERJA)
PENGUKURAN KINERJA TRIWULAN I TAHUN 2023
KECAMATAN KUTOWINANGUN KABUPATEN KEBUMEN**

2. SEKCAM

NO	SASARAN SETRATEGIS	INDIKATOR	TARGET	REALISASI TW				REALISASI S/D TRI	CAPAIAN	PERMASALAHAN	SOLUSI
				I	II	III	IV				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Meningkatnya Perencanaan, Administrasi umum, keuangan dan kepegawaian	Dokumen Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah dan administrasi umum yang sesuai standar	6	3	0			3	50%	Belum maksimal penyerapan anggaran kas	Rapat kordinasi berkait dengan Sub Kegiatan dan Anggaran Kas

PROGRES PENCAPAIAN KINERJA (PENGUKURAN KINERJA)

PENGUKURAN KINERJA TRIWULAN I TAHUN 2023

3.KOORDINATOR PK

NO	SASARAN SETRATEGIS	INDIKATOR	TARGET	REALISASI TW				REALISASI S/D TRIWULAN INI	CAPAIAN	PERMASALAHAN	SOLUSI
				I	II	III	IV				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Tersusunnya dokumen perencanaan dan Penganggaran Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah yang disusun	8	3	0			3	38%	Dalam penyusunan dokumen terkendala data teknis	Koordinasi di OPD atau dinas yang membidangnya
2	Tersusunnya Dokumen evaluasi kinerja perangkat Daerah	Prosentase Dokumen evaluasi kinerja perangkat daerah yang disusun sesuai ketentuan	100%	20%	0%			20%	20%	Dalam penyusunan dokumen terkendala data teknis	Koordinasi di OPD atau dinas yang membidangnya
3	Tersusunnya Dokumen Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	30	10	0			10	33%	Dalam penyusunan dokumen terkendala data teknis	Koordinasi di OPD atau dinas yang membidangnya
4	Tersusunnya Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Prosentase ASN yang mendapatkan gaji dan tunjangan yang sesuai tepat waktu	100%	100%	0%			100%	100%	Tidak ada Rekening Pembulantan di SIPD	Usul Rekening Pembulantan di BPKPD
5	Tersusunnya Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Prosentase bulan pelaksanaan penatausahaan dan Pengujian/verifikasi Keuangan SKPD	100%	30%	0%			30%	30%	Penyusun kelengkapan SPJ terlambat	Mengevaluasi anggaran kas dan Target realisasi keuangan

**PROGRES PENCAPAIAN KINERJA (PENGUKURAN KINERJA)
PENGUKURAN KINERJA TRIWULAN I TAHUN 2023**

4.KOORDINATOR KASUBBAG UMPEG

NO	SASARAN SETRATEGIS	INDIKATOR	TARGET	REALISASI TW				REALISASI S/D TRIWULAN INI	CAPAIAN	PERMASALAHAN	SOLUSI
				I	II	III	IV				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Meningkatnya layanan administrasi umum perangkat daerah	Prosentase terlaksananya kegiatan Administrasi umum perangkat daerah	100%	15%	0%			15%	15%	sebagian kegiatan sudah dilaksanakan	Koordinasi dengan stakeholder
2	Meningkatnya layanan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Prosentase layanan penyediaan komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor yang tepat waktu	100%	31%	0%			31%	31%	Kegiatan sudah dilaksanakan	Menyiapkan data pendukung untuk pelaporan
3	Tersedianya Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Prosentase layanan penyediaan makanan dan minuman rapat yang sesuai aturan	100%	0%	0%			0%	0%	Anggaran di triwulan II	Menunggu anggaran di triwulan II
4	Tersedianya Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Prosentase layanan penyediaan barang cetakan dan penggandaan sesuai aturan	100%	8%	0%			8%	8%	Belum maksimalnya penyerapan anggaran kas	Kordinasi dengan PPTK

5	Meningkatnya layanan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Prosentase layanan penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	100%	25%	0%			25%	25%	Belum maksimalnya penyerapan anggaran kas	Kordinasi dengan PPTK
6	Meningkatnya layanan Penyediaan Bahan/Material	Prosentase layanan Penyediaan Alat Tulis Kantor yang sesuai ketentuan	100%	14%	0%			14%	14%	Belum maksimalnya penyerapan anggaran kas	Kordinasi dengan PPTK
7	Meningkatnya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Prosentase layanan Penyediaan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	100%	0%	0%			0%	0%	Belum ada kegiatan perjalanan dinas Luar	Menunggu undangan dari OPD atau yang lain
8	Meningkatnya layanan Penatausahaan Arsip dinamis pada SKPD	Prosentase layanan Fasilitasi Pengelolaan arsip pada SKPD sesuai ketentuan	100%	99%				99%	99%	Masih kurang penataan Arsip	Bimtek kearsipan
9	Meningkatnya layanan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah bulan penyediaan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik	12	21	0			20.79	173%	-	-
10	Meningkatnya Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang sesuai ketentuan	Prosentase penyediaan jasa pelayanan umum kantor	100%	27%				27%	27%		
11	Meningkatnya Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perijinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Prosentase layanan Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perijinan Kendaraan Dinas Operasional yang sesuai standar	100%	14%	0%			14%	14%		
12	Meningkatnya layanan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah bulan penyediaan jasa surat-menyurat	12	12	0			12	100%		
13	Meningkatnya layanan Pemeliharaan Mebel	Jumlah unit Pemeliharaan Mebel	15	0				0	0%	Anggaran di triwulan II	Kegiatan di triwulan II
14	Meningkatnya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah bulan penyediaan pemeliharaan peralatan dan mesin/pemeliharaan perbaikan peralatan kerja	12	5				5	42%		
15	Meningkatnya layanan Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Prosentase layanan pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor atau bangunan lainnya	100%	0%				0%	0%	Anggaran di triwulan II	Kegiatan di triwulan II

**PROGRES PENCAPAIAN KINERJA (PENGUKURAN KINERJA)
PENGUKURAN KINERJA TRIWULAN I TAHUN 2023**

5.KOORDINATOR KASI TAPEM

NO	SASARAN SETRATEGIS	INDIKATOR	TARGET	REALISASI TW				REALISASI S/D TRI WULAN INI	CAPAIAN	PERMASALAHAN	SOLUSI
				I	II	III	IV				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Meningkatnya layanan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Prosentase layanan penyelenggaraan Pemerintahan Umum sesuai penugasan Kepala Daerah yang dilaksanakan sesuai ketentuan	100%	10%	0%			10%	10%	Administrasi pelaporan keuangan masih perlu di perbaiki lagi	Monitoring dan evaluasi pelaporan keuangan apbdes desa
2	Meningkatnya layanan Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Prosentase layanan Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang sesuai ketentuan	100%	15%	0%			15%	15%	Anggaran kas di di Tri Wulan ke II	Melaksanakan kegiatan monitoring kondusifitas wilayah
3			100%	19%	0%			19%	19%	Dalam perencanaan pembangunan desa masih belum sinkron dengan perencanaan pembangunan daerah	Pembekelan dan pendampingan dalam menyusun perencanaan pembanguna desa

**PROGRES PENCAPAIAN KINERJA (PENGUKURAN KINERJA)
PENGUKURAN KINERJA TRIWULAN I TAHUN 2022**

8.KOORDINATOR KASI KESOS DAN PELAYANAN UMUM

NO	SASARAN SETRATEGIS	INDIKATOR	TARGET	REALISASI TW				REALISASI S/D TRI WULAN INI	CAPAIAN	PERMASALAHAN	SOLUSI
				I	II	III	IV				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Meningkatnya layanan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Prosentase layanan urusan Pemerintahan yang dilimpahkan kepada camat yang sesuai ketentuan	100%	10%	0%			10%	10%	Administrasi pelaporan keuangan masih perlu di perbaiki lagi	Monitoring dan evaluasi pelaporan keuangan apbdes desa
2	Meningkatnya Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	Prosentase Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan yang sesuai standar	100%	41%	0%			41%	41%	Anggaran kas di di Tri Wulan ke II	Melaksanakan kegiatan monitoring kondusifitas wilayah

3	Meningkatnya layanan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Prosentase layanan penyelenggaraan Pemerintahan Umum sesuai penugasan Kepala Daerah yang dilaksanakan sesuai ketentuan	100%	3%	0%			3%	3%	Desa kurang berkordinasi dengan Kecamatan	Kordinasi dengan Desa harus ditingkatkan
4	Meningkatnya Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	Prosentase layanan fasilitasi penanggulangan kemiskinan	100%	3%	0%			3%	3%	Desa kurang berkordinasi dengan Kecamatan	Kordinasi dengan Desa harus ditingkatkan

Kutowinangun, 5 April 2023



KAMAT KUTOWINANGUN

BAWONO ANDI WIDODO, S.STP
Pembina
19810302 199912 1 001

**PROGRES PENCAPAIAN KINERJA (PENGUKURAN KINERJA)
PENGUKURAN KINERJA TRIWULAN II TAHUN 2023
KECAMATAN KUTOWINANGUN KABUPATEN KEBUMEN**

1. CAMAT

NO	SASARAN SETRATEGIS	INDIKATOR	TARGET	REALISASI TW				REALISASI S/D TRIWULAN INI	CAPAIAN	PERMASALAHAN	SOLUSI
				I	II	III	IV				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik Kecamatan Kutowinangun	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kecamatan Kutowinangun	86.50%	13.85%	52.03%			65.88%	76%	Untuk pelayanan PATEN kadang terkendala dengan server rusak, blangko habis, jaringan rusak dll .	Berkordinasi ke Disdukcapil dan Keminfo untuk penyediaan blanko atau untuk menstabilkan jaringan
2	Meningkatnya Perencanaan, Administrasi umum, keuangan dan kepegawaian	Persentase terselenggaranya Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	100%	35%	36.81%			71.59%	71.59%	Ada kegiatan fisik yang sudah dilaksanakan tapi pelaporan SPJ dibulan berikutnya	Berkordinasi dengan PPTK agar mencermati anggaran kas pada bulan berjalan.
3	Meningkatnya Kondusifitas Kecamatan Kutowinangun	Indek kondusifitas Kecamatan	100%	16%	62%			78%	78%	Keadaan kondusif tidak ada kejadian yang menonjol	Selalu berkordinasi dengan forkopimcam
4	Meningkatnya Desa membangun kategori maju dan mandiri	Presentase Desa dengan indek Desa membangun kategori maju dan mandiri	100%	39%	23%			62%	62%	Secara umum Desa lagi dalam proses membangun	Indek Desa Membangun Kategori maju 8 Mandiri 2 berkembang 9

**PROGRES PENCAPAIAN KINERJA (PENGUKURAN KINERJA)
PENGUKURAN KINERJA TRIWULAN II TAHUN 2023
KECAMATAN KUTOWINANGUN KABUPATEN KEBUMEN**

2.SEKCAM

NO	SASARAN SETRATEGIS	INDIKATOR	TARGET	REALISASI TW				REALISASI S/D TRI	CAPAIAN	PERMASALAHAN	SOLUSI
				I	II	III	IV				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Meningkatnya Perencanaan, Administrasi umum, keuangan dan kepegawaian	Dokumen Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah dan administrasi umum yang sesuai standar	6	3	2			5	83%	Belum maksimal penyerapan anggaran kas	Rapat kordinasi berkait dengan Sub Kegiatan dan Anggaran Kas

PROGRES PENCAPAIAN KINERJA (PENGUKURAN KINERJA)

PENGUKURAN KINERJA TRIWULAN II TAHUN 2023

3.KOORDINATOR PK

NO	SASARAN SETRATEGIS	INDIKATOR	TARGET	REALISASI TW				REALISASI S/D TRIWULAN INI	CAPAIAN	PERMASALAHAN	SOLUSI
				I	II	III	IV				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Tersusunnya dokumen perencanaan dan Penganggaran Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah yang disusun	8	3	4			7	88%	Dalam penyusunan dokumen terkendala data teknis	Koordinasi di OPD atau dinas yang membidangnya
2	Tersusunnya Dokumen evaluasi kinerja perangkat Daerah	Prosentase Dokumen evaluasi kinerja perangkat daerah yang disusun sesuai ketentuan	100%	20%	13%			33%	33%	Dalam penyusunan dokumen terkendala data teknis	Koordinasi di OPD atau dinas yang membidangnya
3	Tersusunnya Dokumen Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	30	10	15			25	83%	Dalam penyusunan dokumen terkendala data teknis	Koordinasi di OPD atau dinas yang membidangnya
4	Tersusunnya Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Prosentase ASN yang mendapatkan gaji dan tunjangan yang sesuai tepat waktu	100%	26%	25%			51%	51%	Tidak ada Rekening Pembulantan di SIPD	Usul Rekening Pembulantan di BPKPD
5	Tersusunnya Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Prosentase bulan pelaksanaan penatausahaan dan Pengujian/verifikasi Keuangan SKPD	100%	30%	24%			54%	54%	Penyusun kelengkapan SPJ terlambat	Mengevaluasi anggaran kas dan Target realisasi keuangan

**PROGRES PENCAPAIAN KINERJA (PENGUKURAN KINERJA)
PENGUKURAN KINERJA TRIWULAN II TAHUN 2023**

4.KOORDINATOR KASUBBAG UMPEG

NO	SASARAN SETRATEGIS	INDIKATOR	TARGET	REALISASI TW				REALISASI S/D TRIWULAN INI	CAPAIAN	PERMASALAHAN	SOLUSI
				I	II	III	IV				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Meningkatnya layanan administrasi umum perangkat daerah	Prosentase terlaksananya kegiatan Administrasi umum perangkat daerah	100%	15%	33%			48%	48%	sebagian kegiatan sudah dilaksanakan	Koordinasi dengan stakeholder
2	Meningkatnya layanan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Prosentase layanan penyediaan komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor yang tepat waktu	100%	31%	68%			99%	99%	Kegiatan sudah dilaksanakan	Menyiapkan data pendukung untuk pelaporan
3	Tersedianya Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Prosentase layanan penyediaan makanan dan minuman rapat yang sesuai aturan	100%	0%	38%			38%	38%	Anggaran di triwulan II	Menunggu anggaran di triwulan II
4	Tersedianya Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Prosentase layanan penyediaan barang cetakan dan penggandaan sesuai aturan	100%	8%	0%			8%	8%	Belum maksimalnya penyerapan anggaran kas	Kordinasi dengan PPTK

5	Meningkatnya layanan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Prosentase layanan penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	100%	25%	25%			50%	50%	Belum maksimalnya penyerapan anggaran kas	Kordinasi dengan PPTK
6	Meningkatnya layanan Penyediaan Bahan/Material	Prosentase layanan Penyediaan Alat Tulis Kantor yang sesuai ketentuan	100%	14%	34%			48%	48%	Belum maksimalnya penyerapan anggaran kas	Kordinasi dengan PPTK
7	Meningkatnya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Prosentase layanan Penyediaan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	100%	0%	0%			0%	0%	Kegiatan sudah dilaksanakan	Anggaran kas di bulan juli
8	Meningkatnya layanan Penatausahaan Arsip dinamis pada SKPD	Prosentase layanan Fasilitasi Pengelolaan arsip pada SKPD sesuai ketentuan	100%	99%	0%			99%	99%		
9	Meningkatnya layanan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah bulan penyediaan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik	12	21	18			38.5	321%	-	-
10	Meningkatnya Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang sesuai ketentuan	Prosentase penyediaan jasa pelayanan umum kantor	100%	27%	24%			51%	51%		
11	Meningkatnya Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perijinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Prosentase layanan Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perijinan Kendaraan Dinas Operasional yang sesuai standar	100%	14%	27%			41%	41%		
12	Meningkatnya layanan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah bulan penyediaan jasa surat-menyurat	100	12%	88%			100%	1%		
13	Meningkatnya layanan Pemeliharaan Mebel	Jumlah unit Pemeliharaan Mebel	15	0	0%			0	0%	Menunggu pengajuan GU	GU di proses pengajuan
14	Meningkatnya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah bulan penyediaan pemeliharaan peralatan dan mesin/pemeliharaan perbaikan peralatan kerja	12	5	4			9	75%		
15	Meningkatnya layanan Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Prosentase layanan pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor atau bangunan lainnya	100%	0%	0%			0%	0%	Kegiatan sudah dilaksanakan	Pelaporan SPJ bulan Juli

**PROGRES PENCAPAIAN KINERJA (PENGUKURAN KINERJA)
PENGUKURAN KINERJA TRIWULAN II TAHUN 2023**

5.KOORDINATOR KASI TAPEM

NO	SASARAN SETRATEGIS	INDIKATOR	TARGET	REALISASI TW				REALISASI S/D TRI WULAN INI	CAPAIAN	PERMASALAHAN	SOLUSI
				I	II	III	IV				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Meningkatnya layanan Fasilitasi, Rekomendasi, Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Prosentase pelayanan fasilitasi rekomendasi dan koordinasi pengawasan Pemerintahan Desa yang sesuai ketentuan	100%	40%	21%			61%	61%	Administrasi pelaporan keuangan masih perlu di perbaiki lagi	Monitoring dan evaluasi pelaporan keuangan apbdes desa
2	Meningkatnya layanan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Prosentase layanan fasilitasi pengelolaan keuangan desa dan pendayagunaan aset desa yang tepat waktu	100%	6%	19%			25%	25%	Kegiatan sudah dilaksanakan tapi belum di SPJ kan	SPJ bulan Juli
3	Meningkatnya Fasilitasi dan Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	Prosentase Fasilitasi dan Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	100%	30%	10%			40%	40%	kegiatan belum sepenuhnya dilaksanakan	kegiatan menunggu jadwal

**PROGRES PENCAPAIAN KINERJA (PENGUKURAN KINERJA)
PENGUKURAN KINERJA TRIWULAN II TAHUN 2023**

6.KOORDINATOR KASI PM

NO	SASARAN SETRATEGIS	INDIKATOR	TARGET	REALISASI TW				REALISASI S/D TRI WULAN INI	CAPAIAN	PERMASALAHAN	SOLUSI
				I	II	III	IV				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Meningkatnya layanan Fasilitasi, Rekomendasi, Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Prosentase fasilitasi rekomendasi dan koordinasi pengawasan Pemerintahan Desa yang sesuai ketentuan	100%	40%	21%			61%	61%	Administrasi pelaporan keuangan masih perlu di perbaiki lagi	Monitoring dan evaluasi pelaporan keuangan apbdes desa
2	Meningkatnya layanan Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif	Prosentase layanan fasilitasi Desa musrenbangdes dan musrenbangcam yang sesuai ketentuan	100%	0%	0%			0%	0%	Kegiatan menunggu jadwal	kegiatan dibulan oktober
3	Meningkatnya layanan Fasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa	Prosentase layanan fasilitasi Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (Pembinaan PKK, UKS, BUMDES, Sosmas) yang sesuai ketentuan	100%	68%	0%			68%	68%	Dalam perencanaan pembangunan desa masih belum sinkron dengan perencanaan pembangunan daerah	Pembekelan dan pendampingan dalam menyusun perencanaan pembanguna desa
4	Meningkatnya Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Prosentase dokumen sinkronisasi perencanaan pembangunan daerah dengan pembangunan desa yang sesuai ketentuan	100%	5%	91%			96%	96%		

PROGRES PENCAPAIAN KINERJA (PENGUKURAN KINERJA)

PENGUKURAN KINERJA TRIWULAN II TAHUN 2022

7.KOORDINATOR KASI TRANTIB

NO	SASARAN SETRATEGIS	INDIKATOR	TARGET	REALISASI TW				REALISASI S/D TRI WULAN INI	CAPAIAN	PERMASALAHAN	SOLUSI
				I	II	III	IV				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Meningkatnya layanan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Prosentase layanan penyelenggaraan Pemerintahan Umum sesuai penugasan Kepala Daerah yang dilaksanakan sesuai ketentuan	100%	6%	0%			6%	6%	Kegiatan terfokus di bulan Agustus	Menunggu anggaran kas
2	Meningkatnya layanan Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Prosentase layanan Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang sesuai ketentuan	100%	6%	0%			6%	6%	Kegiatan terfokus di bulan Agustus	Menunggu anggaran kas

**PROGRES PENCAPAIAN KINERJA (PENGUKURAN KINERJA)
PENGUKURAN KINERJA TRIWULAN II TAHUN 2022**

8.KOORDINATOR KASI KESOS DAN PELAYANAN UMUM

NO	SASARAN SETRATEGIS	INDIKATOR	TARGET	REALISASI TW				REALISASI S/D TRI WULAN INI	CAPAIAN	PERMASALAHAN	SOLUSI
				I	II	III	IV				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Meningkatnya layanan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Prosentase layanan urusan Pemerintahan yang dilimpahkan kepada camat yang sesuai ketentuan	100%	41%	11%			52%	52%	Administrasi pelaporan keuangan masih perlu di perbaiki lagi	Monitoring dan evaluasi pelaporan keuangan apbdes desa
2	Meningkatnya Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	Prosentase Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan yang sesuai standar	100%	41%	11%			52%	52%	Anggaran kas di di Tri Wulan ke II	Melaksanakan kegiatan monitoring kondusifitas wilayah
3	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Prosentase pelayanan fasilitasi rekomendasi dan koordinasi pengawasan Pemerintahan Desa yang sesuai ketentuan	100%	3%	0%			3%	3%	Desa kurang berkordinasi dengan Kecamatan	Koordinasi dengan Desa harus ditingkatkan

4	Meningkatnya Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	Prosentase layanan fasilitasi penanggulangan kemiskinan	100%	3%	41%			44%	44%	Desa kurang berkordinasi dengan Kecamatan	Kordinasi dengan Desa harus ditingkatkan
---	---	---	------	----	-----	--	--	-----	-----	---	--

Kutowinangun, 15 juli 2023

KECAMAT KUTOWINANGUN



BAWONO ANDI WIDODO, S.STP
Pembina
19810302 199912 1 001

PROGRES PENCAPAIAN KINERJA (PENGUKURAN KINERJA)
PENGUKURAN KINERJA TRIWULAN III TAHUN 2023

3.KOORDINATOR PK

NO	SASARAN SETRATEGIS	INDIKATOR	TARGET	REALISASI TW				REALISASI S/D TRIWULAN INI	CAPAIAN	PERMASALAHAN	SOLUSI
				I	II	III	IV				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Tersusunnya dokumen perencanaan dan Penganggaran Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah yang disusun	8	3	4	1%		7	88%	Dalam penyusunan dokumen terkendala data teknis	Koordinasi di OPD atau dinas yang membidangnya
2	Tersusunnya Dokumen evaluasi kinerja perangkat Daerah	Prosentase Dokumen evaluasi kinerja perangkat daerah yang disusun sesuai ketentuan	100%	20%	13%	39%		72%	72%	Dalam penyusunan dokumen terkendala data teknis	Koordinasi di OPD atau dinas yang membidangnya
3	Tersusunnya Dokumen Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	30	10	15	55		80	267%	Dalam penyusunan dokumen terkendala data teknis	Koordinasi di OPD atau dinas yang membidangnya
4	Tersusunnya Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Prosentase ASN yang mendapatkan gaji dan tunjangan yang sesuai tepat waktu	100%	26%	25%	29.17%		80%	80%	Tidak ada Rekening Pembulantan di SIPD	Usul Rekening Pembulantan di BPKPD
5	Tersusunnya Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Prosentase bulan pelaksanaan penatausahaan dan Pengujian/verifikasi Keuangan SKPD	100%	30%	24%	12.43%		66%	66%	Penyusun kelengkapan SPJ terlambat	Mengevaluasi anggaran kas dan Target realisasi keuangan

PROGRES PENCAPAIAN KINERJA (PENGUKURAN KINERJA)
PENGUKURAN KINERJA TRIWULAN III TAHUN 2023

4.KOORDINATOR KASUBBAG UMPEG

NO	SASARAN SETRATEGIS	INDIKATOR	TARGET	REALISASI TW				REALISASI S/D TRIWULAN INI	CAPAIAN	PERMASALAHAN	SOLUSI
				I	II	III	IV				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Meningkatnya layanan administrasi umum perangkat daerah	Prosentase terlaksananya kegiatan Administrasi umum perangkat daerah	100%	15%	33%	17%		66%	66%	sebagian kegiatan sudah dilaksanakan	Koordinasi dengan stakeholder
2	Meningkatnya layanan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Prosentase layanan penyediaan komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor yang tepat waktu	100%	31%	68%	0%		99%	99%	Kegiatan sudah dilaksanakan	Menyiapkan data pendukung untuk pelaporan

3	Tersedianya Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Prosentase layanan penyediaan makanan dan minuman rapat yang sesuai aturan	100%	0%	38%	15%		53%	53%	Kegiatan sudah dilaksanakan	Laporan SPJ Bulan berikutnya
4	Tersedianya Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Prosentase layanan penyediaan barang cetakan dan penggandaan sesuai aturan	100%	8%	0%	45.59%		54%	54%	Belum maksimalnya penyerapan anggaran kas	Kordinasi dengan PPTK
5	Meningkatnya layanan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Prosentase layanan penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	100%	25%	25%	25%		75%	75%	Pembayaran menunggu tagihan	
6	Meningkatnya layanan Penyediaan Bahan/Material	Prosentase layanan Penyediaan Alat Tulis Kantor yang sesuai ketentuan	100%	14%	34%	19.13%		67%	67%	Belum maksimalnya penyerapan anggaran kas	Kordinasi dengan PPTK
7	Meningkatnya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Prosentase layanan Penyediaan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	100%	0%	0%	88.13%		88%	88%	Kegiatan sudah dilaksanakan	Anggaran kas di bulan juli
8	Meningkatnya layanan Penatausahaan Arsip dinamis pada SKPD	Prosentase layanan Fasilitasi Pengelolaan arsip pada SKPD sesuai ketentuan	100%	99%	0%	0%		99%	99%		
9	Meningkatnya layanan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah bulan penyediaan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik	100	21	18	13		51.5	52%	-	-
10	Meningkatnya Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang sesuai ketentuan	Prosentase penyediaan jasa pelayanan umum kantor	100%	27%	24%	24.04		2455%	2455%		
11	Meningkatnya Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perijinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Prosentase layanan Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perijinan Kendaraan Dinas Operasional yang sesuai standar	100%	14%	27%	29%		70%	70%		
12	Meningkatnya layanan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah bulan penyediaan jasa surat-menyurat	100	12%	88%	0%		100%	1%		
13	Meningkatnya layanan Pemeliharaan Mebel	Jumlah unit Pemeliharaan Mebel	15	0	0%	15		15	100%	Menunggu pengajuan GU	GU di proses pengajuan
14	Meningkatnya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah bulan penyediaan pemeliharaan peralatan dan mesin/pemeliharaan perbaikan peralatan kerja	12	5	4	1		10	83%		
15	Meningkatnya layanan Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Prosentase layanan pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor atau bangunan lainnya	100%	0%	0%	100		10000%	10000%	Kegiatan sudah dilaksanakan	Pelaporan SPJ bulan Juli

**PROGRES PENCAPAIAN KINERJA (PENGUKURAN KINERJA)
PENGUKURAN KINERJA TRIWULAN III TAHUN 2023**

5.KOORDINATOR KASI TAPEM

NO	SASARAN SETRATEGIS	INDIKATOR	TARGET	REALISASI TW				REALISASI S/D TRIWULAN INI	CAPAIAN	PERMASALAHAN	SOLUSI
				I	II	III	IV				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Meningkatnya layanan Fasilitasi, Rekomendasi, Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Prosentase pelayanan fasilitasi rekomendasi dan koordinasi pengawasan Pemerintahan Desa yang sesuai ketentuan	100%	40%	21%	11%		72%	72%	Administrasi pelaporan keuangan masih perlu di perbaiki lagi	Monitoring dan evaluasi pelaporan keuangan apbdes desa
2	Meningkatnya layanan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Prosentase layanan fasilitasi pengelolaan keuangan desa dan pendayagunaan aset desa yang tepat waktu	100%	6%	19%	41		66%	66%	Kegiatan sudah dilaksanakan tapi belum di SPJ kan	Laporan bulan berikutnya
3	Meningkatnya Fasilitasi dan Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	Prosentase Fasilitasi dan Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	100%	30%	10%	51		91%	91%	Kegiatan sudah dilaksanakan	Laporan bulan berikutnya

**PROGRES PENCAPAIAN KINERJA (PENGUKURAN KINERJA)
PENGUKURAN KINERJA TRIWULAN III TAHUN 2023**

6.KOORDINATOR KASI PM

NO	SASARAN SETRATEGIS	INDIKATOR	TARGET	REALISASI TW				REALISASI S/D TRIWULAN INI	CAPAIAN	PERMASALAHAN	SOLUSI
				I	II	III	IV				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Meningkatnya layanan Fasilitasi, Rekomendasi, Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Prosentase fasilitasi rekomendasi dan koordinasi pengawasan Pemerintahan Desa yang sesuai ketentuan	100%	40%	21%	11%		72%	72%	Administrasi pelaporan keuangan masih perlu di perbaiki lagi	Monitoring dan evaluasi pelaporan keuangan apbdes desa
2	Meningkatnya layanan Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif	Prosentase layanan fasilitasi Desa musrenbangdes dan musrenbangcam yang sesuai ketentuan	100%	0%	0%	6.67		667%	667%	Kegiatan menunggu jadwal Musrenbangcam	kegiatan dibulan oktober

NO	SASARAN SETRATEGIS	INDIKATOR	TARGET					S/D TRI WULAN INI	CAPAIAN	PERMASALAHAN	SOLUSI
				I	II	III	IV				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Meningkatnya layanan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Prosentase layanan urusan Pemerintahan yang dilimpahkan kepada camat yang sesuai ketentuan	100%	41%	11%	17%		69%	69%	Administrasi pelaporan keuangan masih perlu di perbaiki lagi	Monitoring dan evaluasi pelaporan keuangan apbdes desa
2	Meningkatnya Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	Prosentase Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan yang sesuai standar	100%	41%	11%	16.85%		69%	69%	Anggaran kas di di Tri Wulan ke II	Melaksanakan kegiatan monitoring kondusifitas wilayah
3	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Prosentase pelayanan fasilitasi rekomendasi dan koordinasi pengawasan Pemerintahan Desa yang sesuai ketentuan	100%	3%	0%	70		69.68	69.68	Desa kurang berkordinasi dengan Kecamatan	Koordinasi dengan Desa harus ditingkatkan
4	Meningkatnya Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	Prosentase layanan fasilitasi penanggulangan kemiskinan	100%	3%	41%	23.30%		67%	67%	Desa kurang berkordinasi dengan Kecamatan	Koordinasi dengan Desa harus ditingkatkan

Kutowinangun, 2 Oktober 2023

CAMAT KUTOWINANGUN



BAWONO ANDI WIDODO, S.STP
Pembina
19810302 199912 1 001

**PROGRES PENCAPAIAN KINERJA (PENGUKURAN KINERJA)
PENGUKURAN KINERJA TRIWULAN IV TAHUN 2023
KECAMATAN KUTOWINANGUN KABUPATEN KEBUMEN**

1. CAMAT

NO	SASARAN SETRATEGIS	INDIKATOR	TARGET	REALISASI TW				REALISASI S/D TRIWULAN INI	CAPAIAN	PERMASALAHAN	SOLUSI
				I	II	III	IV				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik Kecamatan Kutowinangun	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kecamatan Kutowinangun	86.50%	13.85%	52.03%	25.29%	3%	93.77%	108%	Untuk pelayanan PATEN kadang terkendala dengan server rusak, blangko habis, jaringan rusak dll .	Berkordinasi ke Disdukcapil dan Keminfo untuk penyediaan blanko atau untuk menstabilkan jaringan
2	Meningkatnya Perencanaan, Administrasi umum, keuangan dan kepegawaian	Persentase terselenggaranya Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	100%	35%	36.81%	9%	19%	99.59%	99.59%	Kegiatan Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah sudah dilaksanakan	
3	Meningkatnya Kondusifitas Kecamatan Kutowinangun	Indek kondusifitas Kecamatan	100%	16%	46%	36.90%	2%	100%	100%	Keadaan kondusif tidak ada kejadian yang menonjol	
4	Meningkatnya Desa membangun kategori maju dan mandiri	Presentase Desa dengan indek Desa membangun kategori maju dan mandiri	100%	39%	23%	9%	0%	71%	71%	Secara umum Desa lagi dalam proses membangun	Indek Desa Membangun Kategori maju 8 Mandiri 2 berkembang 9

**PROGRES PENCAPAIAN KINERJA (PENGUKURAN KINERJA)
PENGUKURAN KINERJA TRIWULAN IV TAHUN 2023
KECAMATAN KUTOWINANGUN KABUPATEN KEBUMEN**

2. SEKCAM

NO	SASARAN SETRATEGIS	INDIKATOR	TARGET	REALISASI TW				REALISASI S/D TRI	CAPAIAN	PERMASALAHAN	SOLUSI
				I	II	III	IV				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Meningkatnya Perencanaan, Administrasi umum, keuangan dan kepegawaian	Dokumen Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah dan administrasi umum yang sesuai standar	6	3	2	1	0	6	100%	Kegiatan Dokumen Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kineerja Perangkat Daearah dan Administrasi Umum sudah terlaksana	

PROGRES PENCAPAIAN KINERJA (PENGUKURAN KINERJA)

PENGUKURAN KINERJA TRIWULAN IV TAHUN 2023

3.KOORDINATOR PK

NO	SASARAN SETRATEGIS	INDIKATOR	TARGET	REALISASI TW				REALISASI S/D TRIWULAN INI	CAPAIAN	PERMASALAHAN	SOLUSI
				I	II	III	IV				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Tersusunnya dokumen perencanaan dan Penganggaran Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah yang disusun	8	3	4	1	0	8	100%		
2	Tersusunnya Dokumen evaluasi kinerja perangkat Daerah	Prosentase Dokumen evaluasi kinerja perangkat daerah yang disusun sesuai ketentuan	100%	20%	13%	39%	28%	100%	100%		
3	Tersusunnya Dokumen Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	30	10	15	5	0	30	100%		
4	Tersusunnya Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Prosentase ASN yang mendapatkan gaji dan tunjangan yang sesuai tepat waktu	100%	26%	25%	29.17%	20%	100%	100%		
5	Tersusunnya Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Prosentase bulan pelaksanaan penatausahaan dan Pengujian/verifikasi Keuangan SKPD	100%	30%	24%	12.43%	34%	100%	100%		

**PROGRES PENCAPAIAN KINERJA (PENGUKURAN KINERJA)
PENGUKURAN KINERJA TRIWULAN IV TAHUN 2023**

4.KOORDINATOR KASUBBAG UMPEG

NO	SASARAN SETRATEGIS	INDIKATOR	TARGET	REALISASI TW				REALISASI S/D TRIWULAN INI	CAPAIAN	PERMASALAHAN	SOLUSI
				I	II	III	IV				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Meningkatnya layanan administrasi umum perangkat daerah	Prosentase terlaksananya kegiatan Administrasi umum perangkat daerah	100%	15%	33%	17%	34%	100%	100%		
2	Meningkatnya layanan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Prosentase layanan penyediaan komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor yang tepat waktu	100%	31%	68%	0%	1%	100%	100%		
3	Tersedianya Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Prosentase layanan penyediaan makanan dan minuman rapat yang sesuai aturan	100%	0%	38%	15%	47%	100%	100%		
4	Tersedianya Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Prosentase layanan penyediaan barang cetakan dan penggandaan sesuai aturan	100%	8%	0%	45.59%	46%	100%	100%		

5	Meningkatnya layanan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Prosentase layanan penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	100%	25%	25%	25%	25%	100%	100%		
6	Meningkatnya layanan Penyediaan Bahan/Material	Prosentase layanan Penyediaan Alat Tulis Kantor yang sesuai ketentuan	100%	14%	34%	19.13%	33%	100%	100%		
7	Meningkatnya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Prosentase layanan Penyediaan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	100%	0%	0%	88.13%	0%	88%	88%	honor verifikator tidak dibayarkan karena verifikator menjadi bendahara dan mendapat honor bendahara	
8	Meningkatnya layanan Penatausahaan Arsip dinamis pada SKPD	Prosentase layanan Fasilitasi Pengelolaan arsip pada SKPD sesuai ketentuan	100%	99%	0%	0%	1%	100%	100%		
9	Meningkatnya layanan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah bulan penyediaan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik	12	3	3	3	3	12	100%	Pembayaran listrik dan telepon tergantung pemakaian tiap bulan	anggaran disesuaikan di tahun depan
10	Meningkatnya Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang sesuai ketentuan	Prosentase penyediaan jasa pelayanan umum kantor	100%	27%	24%	20%	29%	100%	100%		
11	Meningkatnya Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perijinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Prosentase layanan Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perijinan Kendaraan Dinas Operasional yang sesuai standar	100%	14%	27%	29%	30%	100%	100%		
12	Meningkatnya layanan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah bulan penyediaan jasa surat-menyurat	12	3	3	3	3	12	100%		
13	Meningkatnya layanan Pemeliharaan Mebel	Jumlah unit Pemeliharaan Mebel	15	0	0	15	0	15	100%		
14	Meningkatnya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah bulan penyediaan pemeliharaan peralatan dan mesin/pemeliharaan perbaikan peralatan kerja	12	3	3	3	3	12	100%		
15	Meningkatnya layanan Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Prosentase layanan pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor atau bangunan lainnya	100%	0%	0%	100%	0%	100%	100%		

**PROGRES PENCAPAIAN KINERJA (PENGUKURAN KINERJA)
PENGUKURAN KINERJA TRIWULAN IVTAHUN 2023**

5.KOORDINATOR KASI TAPEM

NO	SASARAN SETRATEGIS	INDIKATOR	TARGET	REALISASI TW				REALISASI S/D TRI WULAN INI	CAPAIAN	PERMASALAHAN	SOLUSI
				I	II	III	IV				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Meningkatnya layanan Fasilitasi, Rekomendasi, Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Prosentase pelayanan fasilitasi rekomendasi dan koordinasi pengawasan Pemerintahan Desa yang sesuai ketentuan	100%	40%	21%	11%	28%	100%	100%	Administrasi pelaporan keuangan masih perlu di perbaiki lagi	Monitoring dan evaluasi pelaporan keuangan apbdes desa
2	Meningkatnya layanan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Prosentase layanan fasilitasi pengelolaan keuangan desa dan pendayagunaan aset desa yang tepat waktu	100%	6%	19%	35%	40%	100%	100%	Kegiatan sudah dilaksanakan tapi belum di SPJ kan	Laporan bulan berikutnya
3	Meningkatnya Fasilitasi dan Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	Prosentase Fasilitasi dan Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	100%	30%	10%	51%	9%	100%	100%	Kegiatan sudah dilaksanakan	Laporan bulan berikutnya

**PROGRES PENCAPAIAN KINERJA (PENGUKURAN KINERJA)
PENGUKURAN KINERJA TRIWULAN IV TAHUN 2023**

6.KOORDINATOR KASI PM

NO	SASARAN SETRATEGIS	INDIKATOR	TARGET	REALISASI TW				REALISASI S/D TRI WULAN INI	CAPAIAN	PERMASALAHAN	SOLUSI
				I	II	III	IV				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Meningkatnya layanan Fasilitasi, Rekomendasi, Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Prosentase fasilitasi rekomendasi dan koordinasi pengawasan Pemerintahan Desa yang sesuai ketentuan	100%	40%	21%	11%	27%	99%	99%		
2	Meningkatnya layanan Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif	Prosentase layanan fasilitasi Desa musrenbangdes dan musrenbangcam yang sesuai ketentuan	100%	0%	0%	7%	89%	95%	95%	Akomodasi/transport peserta Musrenbang non ASN dibayarkan sesuai dengan daftar kehadiran jadi masih ada saldo	
3	Meningkatnya layanan Fasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa	Prosentase layanan fasilitasi Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (Pembinaan PKK, UKS, BUMDES, Sosmas) yang sesuai ketentuan	100%	68%	0%	29%	3%	100%	100%		
4	Meningkatnya Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Prosentase dokumen sinkronisasi perencanaan pembangunan daerah dengan pembangunan desa yang sesuai ketentuan	100%	5%	91%	3%	1%	100%	100%		

**PROGRES PENCAPAIAN KINERJA (PENGUKURAN KINERJA)
PENGUKURAN KINERJA TRIWULAN IV TAHUN 2023**

7.KOORDINATOR KASI TRANTIB

NO	SASARAN SETRATEGIS	INDIKATOR	TARGET	REALISASI TW				REALISASI S/D TRIWULAN INI	CAPAIAN	PERMASALAHAN	SOLUSI
				I	II	III	IV				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Meningkatnya layanan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Prosentase layanan penyelenggaraan Pemerintahan Umum sesuai penugasan Kepala Daerah yang dilaksanakan sesuai ketentuan	100%	6%	0%	92%	2%	100%	100%		
2	Meningkatnya layanan Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Prosentase layanan Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang sesuai ketentuan	100%	6%	0%	92%	2%	100%	100%		

**PROGRES PENCAPAIAN KINERJA (PENGUKURAN KINERJA)
PENGUKURAN KINERJA TRIWULAN IV TAHUN 2023**

8.KOORDINATOR KASI KESOS DAN PELAYANAN UMUM

NO	SASARAN SETRATEGIS	INDIKATOR	TARGET	REALISASI TW				REALISASI S/D TRIWULAN INI	CAPAIAN	PERMASALAHAN	SOLUSI
				I	II	III	IV				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Meningkatnya layanan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Prosentase layanan urusan Pemerintahan yang dilimpahkan kepada camat yang sesuai ketentuan	100%	41%	11%	17%	31%	100%	100%		
2	Meningkatnya Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	Prosentase Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan yang sesuai standar	100%	41%	11%	16.85%	31%	100%	100%		
3	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Prosentase pelayanan fasilitasi rekomendasi dan koordinasi pengawasan Pemerintahan Desa yang sesuai ketentuan	100%	3%	0%	70%	27%	100%	100%		

4	Meningkatnya Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	Prosentase layanan fasilitasi penanggulangan kemiskinan	100%	3%	41%	23.30%	33%	100%	100%		
---	---	---	------	----	-----	--------	-----	------	------	--	--

Kutowinangun, 31 Desember 2023

KABUPATEN KUTOWINANGUN
KECAMATAN KUTOWINANGUN
KEBUNING
BAWONO ANDI WIDODO, S.STP
Pembina
19810302 199912 1 001





PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
KECAMATAN KUTOWINANGUN
Jl. Stasiun No. 23 Kutowinangun, Kec. Kutowinangun
Telp. 0287 – 661001 Kode Pos 54393

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Drs. ANTON PURWANTO
Jabatan : Camat Kutowinangun
Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : H. ARIF SUGIYANTO, SH
Jabatan : Bupati Kebumen
Selaku atasan langsung Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Kebumen, 20 Januari 2023

Pihak Kedua,



H. ARIF SUGIYANTO, SH

Pihak Pertama,

Drs. ANTON PURWANTO
NIP. 197510241996021002

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
KECAMATAN KUTOWINANGUN**

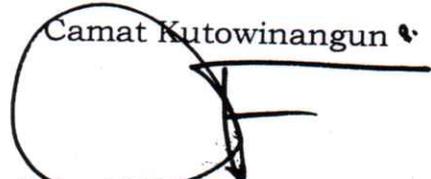
No	Tujuan dan Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Triwulan			
					I	II	III	IV
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
Tujuan :								
1.	Mewujudkan peningkatan kualitas pelayanan publik	Meningkatnya Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	indeks	86				86
Sasaran :								
2.	Meningkatnya kualitas pelayanan public oleh Kecamatan	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kecamatan Kutowinangun	indeks	86,50				86,50

NO.	PROGRAM	URUSAN	ANGGARAN	KETERANGAN*
1.	Program Penunjang Pemerintahan Kabupaten/Kota	Urusan Daerah	Rp 1.744.803.000,-	APBD
2.	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik		Rp 87.960.000,-	APBD
3.	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum		Rp 33.370.000,-	APBD
4.	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa		Rp 142.882.000,-	APBD


 Bupati Kebumen

H. ARIF SUGIYANTO, SH

Kebumen, 20 Januari 2023


 Camat Kutowinangun

Drs. ANTON PURWANTO
 NIP. 197510241996021002



PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
KECAMATAN KUTOWINANGUN
Jalan Stasiun Nomor 23 Telepon (0287) 661001
KUTOWINANGUN - 54393
Email : kec_kutowinangun@yahoo.com

PERJANJIAN KINERJA
TAHUN 2023

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan dibawah ini :

Nama : MUHAMAD HARYANTO, S.A.P

Jabatan : KEPALA SUB BAGIAN PERENCANAAN DAN KEUANGAN

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : ASEP HARTOYO, S.KM., M.Si

Jabatan : SEKRETARIS KECAMATAN KUTOWINANGUN

Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Kebumen, Januari 2023

SEKRETARIS CAMAT
KECAMATAN KUTOWINANGUN



ASEP HARTOYO, S.KM., M.Si
NIP. 19700712 1994031007



KASUBAG PERENCANAAN DAN
KEUANGAN KECAMATAN
KUTOWINANGUN



MUHAMAD HARYANTO, S.A.P.
NIP. 19790712 201001 1005

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
KASUBBAG PERENCANAAN DAN KEUANGAN PADA
KECAMATAN KUTOWINANGUN

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target	TRIWULAN			
					I	II	III	IV
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1.	Meningkatnya layanan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Prosentase dokumen perencanaan dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang disusun sesuai ketentuan	%	100%	10	40	40	10
2.	Tersusunya dokumen perencanaan dan Penganggaran Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah yang disusun	Dokumen	8	8	0	0	0
3.	Tersusunya Dokumen evaluasi kinerja perangkat Daerah	Jumlah Dokumen evaluasi kinerja perangkat Daerah	Dokumen	4	3	0	1	0
4.	Tersusunya Dokumen Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Prosentase terlaksananya kegiatan administrasi keuangan Perangkat Daerah yang sesuai ketentuan	%	100%	50	40	0	10

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
KASUBBAG PERENCANAAN DAN KEUANGAN PADA
KECAMATAN KUTOWINANGUN

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target	TRIWULAN			
					I	II	III	IV
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1.	Meningkatnya layanan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Prosentase dokumen perencanaan dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang disusun sesuai ketentuan	%	100%	10	40	40	10
2.	Tersusunya dokumen perencanaan dan Penganggaran Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah yang disusun	Dokumen	8	8	0	0	0
3.	Tersusunya Dokumen evaluasi kinerja perangkat Daerah	Jumlah Dokumen evaluasi kinerja perangkat Daerah	Dokumen	4	3	0	1	0
4.	Tersusunya Dokumen Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Prosentase terlaksananya kegiatan administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang sesuai ketentuan	%	100%	50	40	0	10

5.	Tersusunnya Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Prosentase ASN yang mendapatkan gaji dan tunjangan yang sesuai tepat waktu	%	100%	100	0	0	0
6.	Tersusunnya Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah bulan pelaksanaan penatausahaan dan Pengujian/verifikasi Keuangan SKPD	Bulan	12	5	3	3	1

NO.	KEGIATAN/SUB KEGIATAN	ANGGARAN	KETERANGAN
1.	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah.	5.700.000	-
2.	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	3.600.000	-
3.	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	1.625.683.000	-
4.	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD.	12.150.000	-

SEKRETARIS CAMAT
KECAMATAN KUTOWINANGUN



ASEP HARTOYO, S.KM., M.Si
NIP. 19700712 1994031007

KASUBBAG PERENCANAAN
DAN KEUANGAN
KECAMATAN KUTOWINANGUN



MUHAMAD HARYANTO, S.A.P.
NIP. 19790712 201001 1005

**TARGET, REALISASI FISIK DAN KEUANGAN KEGIATAN PERANGKAT DAERAH KECAMATAN KUTOWINANGUN
TAHUN ANGGARAN 2023**

KODE pro / keg / sub	NAMA KEGIATAN	JUMLAH ANGGARAN (Rp)	SUMBER DANA	TARGET S/D BULAN INI		REALISASI KEUANGAN				REALISASI FISIK S/D BULAN INI (%)	DEVIASI		IDENTIFIKASI MASALAH		
				KEUANGAN (Rp)	FISIK (%)	SPJ					KEU SPJ (%)	FISIK (%)	PERMASALAHAN	UPAYA/SOLUSI	
						S/D BULAN LALU (Rp)	BULAN INI (Rp)	S/D BULAN INI (Rp)	(%)						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1.859.102.000		1.859.102.000	100	100	1.663.647.481	130.564.292	1.794.211.773	96,51	100	3,49	0		
7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	9.300.000		9.300.000	100	100	8.570.050	176.700	8.746.750	94,05	100	5,95	0		
7.01.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	5.700.000	APBD (DAU/PAD/ Lainnya)	5.700.000	100	100	5.579.750		5.579.750	97,89	100	2,11	0		
7.01.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	3.600.000	APBD (DAU/PAD/ Lainnya)	3.600.000	100	100	2.990.300	176.700	3.167.000	87,97	100	12,03	0	Bahan bakar minyak tidak habis	karena digunakan hanya untuk perjalanan dinas ke luar daerah
7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1.751.932.000		1.751.932.000	100	100	1.564.578.587	127.768.544	1.692.347.131	96,6	100	3,4	0		
7.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	1.739.782.000	APBD (DAU/PAD/ Lainnya)	1.739.782.000	100	100	1.553.459.479	127.107.016	1.680.566.495	96,6	100	3,4	0		
7.01.01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12.150.000	APBD (DAU/PAD/ Lainnya)	12.150.000	100	100	11.119.108	661.528	11.780.636	96,96	100	3,04	0		
7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	27.450.000		27.450.000	100	100	27.218.300	100.000	27.318.300	99,52	100	0,48	0		
7.01.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	1.600.000	APBD (DAU/PAD/ Lainnya)	1.600.000	100	100	1.597.300		1.597.300	99,83	100	0,17	0		
7.01.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	10.100.000	APBD (DAU/PAD/ Lainnya)	10.100.000	100	100	10.092.500		10.092.500	99,93	100	0,07	0		
7.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	3.750.000	APBD (DAU/PAD/ Lainnya)	3.750.000	100	100	3.750.000		3.750.000	100	100	0	0		
7.01.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	1.200.000	APBD (DAU/PAD/ Lainnya)	1.200.000	100	100	1.100.000	100.000	1.200.000	100	100	0	0		
7.01.01.2.06.07	Penyediaan Bahan/Material	8.000.000	APBD (DAU/PAD/ Lainnya)	8.000.000	100	100	7.989.000		7.989.000	99,86	100	0,14	0		
7.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	800.000	APBD (DAU/PAD/ Lainnya)	800.000	100	100	705.000		705.000	88,13	100	11,87	0	honor verifikator tidak dibayarkan karena verifikator menjadi kepala desa dan	
7.01.01.2.06.10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	2.000.000	APBD (DAU/PAD/ Lainnya)	2.000.000	100	100	1.984.500		1.984.500	99,23	100	0,77	0		
7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	33.600.000		33.600.000	100	100	26.854.346	2.318.548	29.172.894	86,82	100	13,18	0		
7.01.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	500.000	APBD (DAU/PAD/ Lainnya)	500.000	100	100	500.000		500.000	100	100	0	0		
7.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	15.000.000	APBD (DAU/PAD/ Lainnya)	15.000.000	100	100	9.418.746	1.157.548	10.576.294	70,51	100	29,49	0	terbayar listrik dan telepon tergantung penyelesaian tiap bulan	anggaran disesuaikan di tahun depan
7.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	18.100.000	APBD (DAU/PAD/ Lainnya)	18.100.000	100	100	16.935.600	1.161.000	18.096.600	99,98	100	0,02	0		

7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	36.820.000		36.820.000	100	100	36.426.198	200.500	36.626.698	99,48	100	0,52	0		
7.01.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	21.298.000	APBD (DAU/PAD/ Lainnya)	21.298.000	100	100	20.904.198	200.500	21.104.698	99,09	100	0,91	0		
7.01.01.2.09.05	Pemeliharaan Mebel	2.650.000	APBD (DAU/PAD/ Lainnya)	2.650.000	100	100	2.650.000		2.650.000	100	100	0	0		
7.01.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	3.990.000	APBD (DAU/PAD/ Lainnya)	3.990.000	100	100	3.990.000		3.990.000	100	100	0	0		
7.01.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	8.882.000	APBD (DAU/PAD/ Lainnya)	8.882.000	100	100	8.882.000		8.882.000	100	100	0	0		
7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	98.786.000		98.786.000	100	100	93.554.300	5.140.600	98.694.900	99,91	100	0,09	0		
7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	98.786.000		98.786.000	100	100	93.554.300	5.140.600	98.694.900	99,91	100	0,09	0		
7.01.02.2.04.02	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	98.786.000	APBD (DAU/PAD/ Lainnya)	98.786.000	100	100	93.554.300	5.140.600	98.694.900	99,91	100	0,09	0		
7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	33.370.000		33.370.000	100	100	33.165.600	53.400	33.219.000	99,55	100	0,45	0		
7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	33.370.000		33.370.000	100	100	33.165.600	53.400	33.219.000	99,55	100	0,45	0		
7.01.05.2.01.01	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	33.370.000	APBD (DAU/PAD/ Lainnya)	33.370.000	100	100	33.165.600	53.400	33.219.000	99,55	100	0,45	0		
7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	142.882.000		142.882.000	100	100	141.085.300	428.000	141.513.300	99,04	100	0,96	0		
7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	142.882.000		142.882.000	100	100	141.085.300	428.000	141.513.300	99,04	100	0,96	0		
7.01.06.2.01.03	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	24.210.000	APBD (DAU/PAD/ Lainnya)	24.210.000	100	100	24.013.400	76.800	24.090.200	99,51	100	0,49	0		
7.01.06.2.01.08	Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	3.000.000	APBD (DAU/PAD/ Lainnya)	3.000.000	100	100	2.921.700	53.600	2.975.300	99,18	100	0,82	0		
7.01.06.2.01.09	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	4.500.000	APBD (DAU/PAD/ Lainnya)	4.500.000	100	100	4.171.700	297.600	4.469.300	99,32	100	0,68	0		

7.01.06.2.01.13	Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif	25.992.000	APBD (DAU/PAD/ Lainnya)	25.992.000	100	100	24.841.100		24.841.100	95,57	100	4,43	0		
7.01.06.2.01.16	Fasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa	82.180.000	APBD (DAU/PAD/ Lainnya)	82.180.000	100	100	82.150.750		82.150.750	99,96	100	0,04	0		
7.01.06.2.01.17	Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	3.000.000	APBD (DAU/PAD/ Lainnya)	3.000.000	100	100	2.986.650		2.986.650	99,56	100	0,44	0		
JUMLAH		2.134.140.000		2.134.140.000	100	2.134.140.000,00	1.931.452.681	136.186.292	2.067.638.973	96,88	100	3,12	0		


 KAMAT KUTOWINANGUN

BAWONO ANDI WIDODO, S.STP
 Pembina
 NIP 19810302 199912 1 001

**DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH**

**FORMULIR
DPA - BELANJA
SKPD**

KAB. KEBUMEN
TAHUN ANGGARAN 2024

Nomor DPA : DPA/A.1/7.01.0.00.0.00.12.0000/001/2024

SKPD : 7.01.0.00.0.00.12.0000 - CAMAT KUTOWINANGUN

Rekapitulasi Dokumen Pelaksanaan Belanja Berdasarkan Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Urusan	Bidang Urusan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Uraian	Sumber Dana	Lokasi	Jumlah					T+1
								T-1	Tahun				
									Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	
7.01.0.00.0.00.12.0000 - KECAMATAN KUTOWINANGUN								Rp3.264.618.000	Rp27.721.000	Rp0	Rp0	Rp3.292.339.000	
7					UNSUR KEWILAYAHAN			Rp3.264.618.000	Rp27.721.000	Rp0	Rp0	Rp3.292.339.000	
7	01				KECAMATAN			Rp3.264.618.000	Rp27.721.000	Rp0	Rp0	Rp3.292.339.000	
7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			Rp1.948.825.000	Rp27.721.000	Rp0	Rp0	Rp1.976.546.000	
7	01	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			Rp13.000.000	Rp0	Rp0	Rp0	Rp13.000.000	
7	01	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Rp9.000.000	Rp0	Rp0	Rp0	Rp9.000.000	
7	01	01	2.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Rp4.000.000	Rp0	Rp0	Rp0	Rp4.000.000	
7	01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			Rp1.758.711.000	Rp0	Rp0	Rp0	Rp1.758.711.000	
7	01	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Rp1.743.711.000	Rp0	Rp0	Rp0	Rp1.743.711.000	
7	01	01	2.02	0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Rp15.000.000	Rp0	Rp0	Rp0	Rp15.000.000	
7	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah			Rp66.874.000	Rp0	Rp0	Rp0	Rp66.874.000	
7	01	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Rp4.500.000	Rp0	Rp0	Rp0	Rp4.500.000	
7	01	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Rp33.000.000	Rp0	Rp0	Rp0	Rp33.000.000	
7	01	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Rp6.999.000	Rp0	Rp0	Rp0	Rp6.999.000	

Urusan	Bidang Urusan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Uraian	Sumber Dana	Lokasi	Jumlah						T+1
								T-1	Tahun				Jumlah	
									Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer		
7	01	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Rp1.500.000	Rp0	Rp0	Rp0	Rp1.500.000	
7	01	01	2.06	0007	Penyediaan Bahan/Material	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Rp12.375.000	Rp0	Rp0	Rp0	Rp12.375.000	
7	01	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Rp6.000.000	Rp0	Rp0	Rp0	Rp6.000.000	
7	01	01	2.06	0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Rp2.500.000	Rp0	Rp0	Rp0	Rp2.500.000	
7	01	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				Rp279.000	Rp27.721.000	Rp0	Rp0	Rp28.000.000	
7	01	01	2.07	0005	Pengadaan Mebel	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Rp0	Rp6.000.000	Rp0	Rp0	Rp6.000.000	
7	01	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Rp279.000	Rp21.721.000	Rp0	Rp0	Rp22.000.000	
7	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				Rp46.012.000	Rp0	Rp0	Rp0	Rp46.012.000	
7	01	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Rp1.000.000	Rp0	Rp0	Rp0	Rp1.000.000	
7	01	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Rp15.000.000	Rp0	Rp0	Rp0	Rp15.000.000	
7	01	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Rp30.012.000	Rp0	Rp0	Rp0	Rp30.012.000	
7	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				Rp63.949.000	Rp0	Rp0	Rp0	Rp63.949.000	
7	01	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Rp45.949.000	Rp0	Rp0	Rp0	Rp45.949.000	
7	01	01	2.09	0005	Pemeliharaan Mebel	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Rp5.000.000	Rp0	Rp0	Rp0	Rp5.000.000	
7	01	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Dana Transfer Umum-Dana			Rp4.000.000	Rp0	Rp0	Rp0	Rp4.000.000	

Urusan	Bidang Urusan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Uraian	Sumber Dana	Lokasi	Jumlah					T+1
								T-1	Tahun				
									Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	
						Alokasi Umum							
7	01	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Rp9.000.000	Rp0	Rp0	Rp0	Rp9.000.000
7	01	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK				Rp1.184.295.000	Rp0	Rp0	Rp0	Rp1.184.295.000
7	01	02	2.04		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat				Rp1.184.295.000	Rp0	Rp0	Rp0	Rp1.184.295.000
7	01	02	2.04	0002	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Rp86.031.000	Rp0	Rp0	Rp0	Rp86.031.000
7	01	02	2.04	0003	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Rp1.098.264.000	Rp0	Rp0	Rp0	Rp1.098.264.000
7	01	05			PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM				Rp18.572.000	Rp0	Rp0	Rp0	Rp18.572.000
7	01	05	2.01		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah				Rp18.572.000	Rp0	Rp0	Rp0	Rp18.572.000
7	01	05	2.01	0001	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Rp18.572.000	Rp0	Rp0	Rp0	Rp18.572.000
7	01	06			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA				Rp112.926.000	Rp0	Rp0	Rp0	Rp112.926.000
7	01	06	2.01		Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa				Rp112.926.000	Rp0	Rp0	Rp0	Rp112.926.000
7	01	06	2.01	0003	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Rp40.000.000	Rp0	Rp0	Rp0	Rp40.000.000
7	01	06	2.01	0008	Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Rp4.000.000	Rp0	Rp0	Rp0	Rp4.000.000
7	01	06	2.01	0009	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Rp15.000.000	Rp0	Rp0	Rp0	Rp15.000.000
7	01	06	2.01	0013	Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Rp38.000.000	Rp0	Rp0	Rp0	Rp38.000.000
7	01	06	2.01	0016	Fasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Rp11.000.000	Rp0	Rp0	Rp0	Rp11.000.000
7	01	06	2.01	0017	Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Rp4.926.000	Rp0	Rp0	Rp0	Rp4.926.000

Rencana Realisasi Belanja per Bulan*)

(Rp)

Januari	Rp152.104.000
Februari	Rp231.552.500
Maret	Rp456.261.000
April	Rp309.112.000
Mei	Rp711.621.000
Juni	Rp397.737.500
Juli	Rp294.470.000
Agustus	Rp201.262.000
September	Rp235.425.000
Oktober	Rp178.320.500
November	Rp97.707.500
Desember	Rp26.766.000
Jumlah	Rp3.292.339.000

Kebumen, Tanggal 27 Desember 2023

CAMAT KUTOWINANGUN

BAWONO ANDI WIDODO, S.STP
NIP. 198103021999121001

Mengesahkan,
PPKD

Drs. ADEN ANDRI SUSILO, M.Si
NIP. 197405291993031001

Tim Anggaran Pemerintah Daerah

No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1.	VIADO HARTANTO,S.M	198812112011011004	KEPALA SUBBIDANG PERENCANAAN ANGGARAN BPKPD KAB. KEBUMEN	
2.	TAUKHID,S.E	198109192011011005	PERENCANA AHLI MUDA SEBAGAI SUBKOR PERENCANAAN DAN PENDANAAN BAPPEDA KAB. KEBUMEN	
3.	FATKHUL MUSLIMIN,S.Si	198005062006041011	PENELAAH KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA BAG. PBJ SETDA KAB. KEBUMEN	

*) Sesuai periodisasi SPD